

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI
MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 50 KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
DI KENAGARIAN VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Oleh:

RATNA SARI WULAN
NIM. 11575201022



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI
MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 50 KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
DI KENAGARIAN VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat Guna mencapai Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

RATNA SARI WULAN
NIM. 11575201022



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2019**

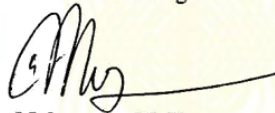
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ratna Sari Wulan
 NIM : 11575201022
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota

Disetujui oleh
 Dosen Pembimbing



Dr. Mahamazar, M. Hum
 NIP.19760426 200701 1 016

Mengetahui

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Ilmu Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Saif. HM, M. Ag, MM
 NIP. 196205121989031003

Dr. Kamaruddin S. Sos. M. Si
 NIP. 197961012907101003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

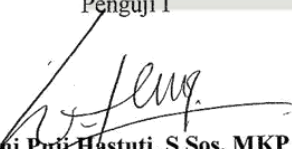
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ratna Sari Wulan
 NIM : 11575201022
 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi Negara
 Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI DI KENAGARIAN VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 Tanggal ujian : 27 September 2019

**DISETUJUI OLEH:
 KETUA PENGUJI**


Dra. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 NIP. 19640508 199303 2 002

MENGETAHUI:

Penguji I

Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP. 19810505 200604 2 006

Penguji II

Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
 NIK. 130 717 057

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI DIKENAGARIAN VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN 50 KOTA

Oleh:

Ratna Sari Wulan

Penelitian ini dilakukan di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan nagari berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan dalam mengambil data. Adapun teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Sampling Jenuh yang berdasarkan teori Sugiyono yaitu teknik penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel apabila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan menyebar angket kepada responden dan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi sebuah nagari melalui empat tahapan yaitu mulai dari Taratak, Dusun, Koto dan Nagari. Pada sistem pemerintahan nagari menurut Perda Kab. 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, pemerintahan nagari dipimpin oleh seorang Walinagari dan perangkat nagari serta dibantu oleh Bamus Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini terlihat bahwa pemerintahan nagari secara umum lebih mendominasi pemerintahan dibandingkan dengan Bamus Nagari, dikarenakan kurangnya peran Bamus Nagari dalam menjalankan tugasnya sebagai penampung aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal sudah mulai luntur, hal ini disebabkan oleh peran niniak mamak sudah tidak begitu dirasakan lagi.

Kata Kunci: Pemerintahan, Sistem, Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan rasa syukur tanpa batas penulis persembahkan kehadirat-Nya yang telah memberikan nikmat iman, ikhsan dan islam. Shalawat beriringan salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yaitu Baginda Rasulullah SAW yang merupakan figure sentral umat Islam. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari Di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota”** ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak, segala macam kendala yang dihadapi dapat dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Refrizal dan Ibunda Erlinda Yarni yang telah mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan penulis dan memberikan kasih sayang, senantiasa mendoakan penulis dalam menuntut ilmu agar menjadi manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang patuh terhadap agama dan masyarakat semuanya serta abang kandung Noviard dan Peri Sandria. Terima kasih telah memberikan dukungan dan kepercayaan dalam menyelesaikan pendidikan ini

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., M.Ag selaku rektor Universitas Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rector lainnya

3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag MM selaku dekan fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

4. Bapak Kamarudin, S. Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara

5. Ibu Weni Puji Hastuti, S.Sos, selaku sekretaris jurusan Ilmu Administrasi Negara

6. Bapak Mashuri, MA yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi Anak Didiknya

7. Bapak Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukan beliau sehari-hari untuk memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesai skripsi ini

8. Bapak/Ibuk dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

9. Bapak Yon Hendri selaku Walinagari VII Koto Talago dan semua pegawai nagari Nagari VII Koto Talago yang telah membantu dan member masukan kepada penulis dalam melakukan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat “Konco Arek” Ameng yang selalu memberikan motivasi dan kenangan yang sangat berharga dari awal masuk kuliah sampai akhir kuliah.
 11. Kawan rantau M. naufal Rajif, Novri Eventriola dan Iffan Ramadhan yang telah memberikan semangat, pelajaran hidup dan ada dikala susah dan senang
 12. Keluarga Cemara Nortilasari, Mardatila Hastuti, Ririn Rayhana Fitri, Mia Febriza Ramadhanti, Tari Yulia Ningsih, Indah Handayani, dan Hafifah yang telah memberikan warna dan keseruan dalam menjalani perkuliahan
 13. Tidak lupa berterimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Negara local A,B,C,E,F, dan G serta khusus Lokal D angkatan 2015
 14. Seluruh keluarga, rekan dan sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Tiada kata yang pantas penulis ucapkan kepada semua pendukung dan penyemangat penulis ucapkan terimakasih banyak semoga Allah swt memberikan baktian dan kebaikan yang berlipat ganda.

Pekanbaru, Oktober 2019
Penulis

Ratna Sari Wulan
11575201022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Teori Sistem.....	11
2.2 Pemerintahan Desa.....	13
2.3 Pemerintahan Nagari.....	16
2.4 Perbedaan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari	25
2.5 Pandangan Islam terhadap Pemerintahan	27
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Definisi Konsep	33
2.8 Konsep Operasional	34
2.9 Kerangka Pemikiran penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.3 Metode pengumpulan Data	38
3.4 Populasi dan Sampel	39
3.5 Teknik penarikan sampel	41
3.6 Metode Analisis data.....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat	43
4.2. Keadaan Geografis	46
4.3. Jumlah Penduduk	47
4.4. Lembaga Kemasyarakatan Nagari	50
4.5. Struktur Organisasi Pemerintahan	58

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden	59
5.2. Pemerintahan Nagari	61
5.3. Bamus Nagari	108

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan	127
6.2. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Penduduak Kenagarian VII Koto Talago.....	4
Tabel 2.1 : Perbandingan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari	26
Tabel 2.2: Review Penelitian Terdahulu	32
Tabel 2.3 : Konsep operasional penelitian	35
Tabel 3.1: Populasi dan sampel penelitian.....	41
Tabel 4.1 : jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	47
Tabel 4.2 : jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	48
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	49
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama	50
Tabel 4.5 : Susunan pengurus Kerapatan Adat Nagari	51
Tabel 4.6 : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	52
Tabel 4.7 : Susunan Kelembagaan Bamus Nagari	53
Tabel 4.8 : Susunan Pengurus Bundo Kanduang Nagari Tujuh Koto Talago.....	55
Tabel 4.9 : Susunan Kepengurusan PKK Nagari Tujuh Koto Talago.....	56
Tabel 4.10 : Susunan Pengurus Karang Taruna Nagari Tujuh Koto Talago.....	57
Tabel 5.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	59
Tabel 5.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	60
Tabel 5.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.4 : Tanggapan responden tentang pemerintaha Nagari VII Koto Talago telah bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Nagari VII Koto Talago	64
Tabel 5.5: Tanggapan Responden Tentang Pemerintah nagari VII Koto Talago sudah melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan Kabupaten.....	66
Tabel 5.6 : Tanggapan responden tentang apakah pemerintah nagari VII Koto talago sangat baik dalam melakukan wewenang yang telah diberikan dan tidak pernah terjadi penyelewengan terhadap wewenang tersebut.	68
Tabel 5.7 : jumlah kelompok tani di VII Koto Talago.....	72
Tabel 5.8: Tanggapan responden tentang hak yang ada pada pemerintahan Nagari VII Koto Talago untuk mengatur dan mengurus nagari tidaklah memberatkan masyarakat nagari.....	75
Tabel 5.9 : Tanggapan responden terhadap Pemerintah Nagari VII Koto Talago bisa melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.	77
Tabel 5.10: ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari VII Koto talago	78
Tabel 5.11 : Tanggapan responden tentang pemerintah nagari VII Koto Talago bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	79
Tabel 5.12 :Sumber pendapatan masyarakat nagari.....	80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.13 : Tanggapan responden tentang pemerintahan nagari VII Koto Talago dapat mengembangkan kehidupan Demokrasi Masyarakat Nagari.....	81
Tabel 5.14 : Tanggapan responden tentang pemerintahan Nagari VII Koto Talago Dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan di tengah masyarakat nagari.....	82
Tabel 5.15 : pembangunan yang telah terealisasi di Jorong Sipingai	83
Tabel 5. 16: Tanggapanr responden tentang perangkat nagari VII Koto Talago telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.....	84
Tabel 5.17: Tanggapan responden tentang Pemerintah nagari VII Koto talago dapat meningkatkan pelayanan dasar pendidikan nagari.	85
Tabel 5.18 : pelayanan dasar pendidikan nagari	87
Tabel 5.19 : Tanggapan responden tentang pemerintah nagari VII Koto talago dapat meningkatkan fasilitas pelayanan dasar kesehatan nagari.....	88
Tabel 5.20 : Fasilitas Kesehatan Nagari.....	89
Tabel 5.21 : Penyediaan jasa layanan kesehatan nagari.....	89
Tabel 5.22 : Tanggapan responden tentang pemerintahan nagari VII Koto Talago dapat meningkatkan fasilitas umum yang layak	90
Tabel 5.23 : Fasilitas Umum Nagari VII Koto Talago Dibidang Perekonomian...	91
Tabel 5.24 : Tanggapan responden tentang apakah pemerintah nagari VII KotoTalago dapat mengembangkan jaminan sosial.....	92
Tabel 5.25 : penerima raskin di tujuh koto talago	93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.26 : Tanggapan responden tentang pemeritahan nagari VII Koto Talago Dapat menyusun rencana dan tata ruang nagari.....	93
Tabel 5.27 : Tanggapan responden tentang pemerintah Nagari VII Koto Talago dapat meningkatkan sumber daya yang produktif didalam nagari.....	94
Tabel 5.28 : Tanggapan responden tentang pemerintah Nagari VII Koto Talago dapat melestarikan lingkungan hidup didalam nagari.....	96
Tabel 5.29 : Tanggapan responden tentang apakah pemerintah nagari VII Koto talago dapat mengelola administrasi kependudukan.....	97
Tabel 5.30 : jumlah penduduk tujuh koto talago.....	98
Tabel 5.31 : penduduk berdasarkan kategori tingkat pendidikan.	99
Tabel 5.32 : Tanggapan responden tentang pemerintah nagari VII Koto Talago dapat melestarikan nilai sosial adat dan syarak.....	100
Tabel 5.33 : Tanggapan responden tentang pemerintahan nagari VII Koto talago dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.....	103
Tabel 5.34 : Tanggapan responden tentang pemerintah nagari VII Koto Talago telah menerapkan asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari.....	106
Tabel 5.35: Tanggapan responden tentang Bamus Nagari VII Koto Talago dapat menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat nagari.....	109
Tabel 5.36 : Tanggapan responden tentang bamus Nagari VII Koto Talago dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.....	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

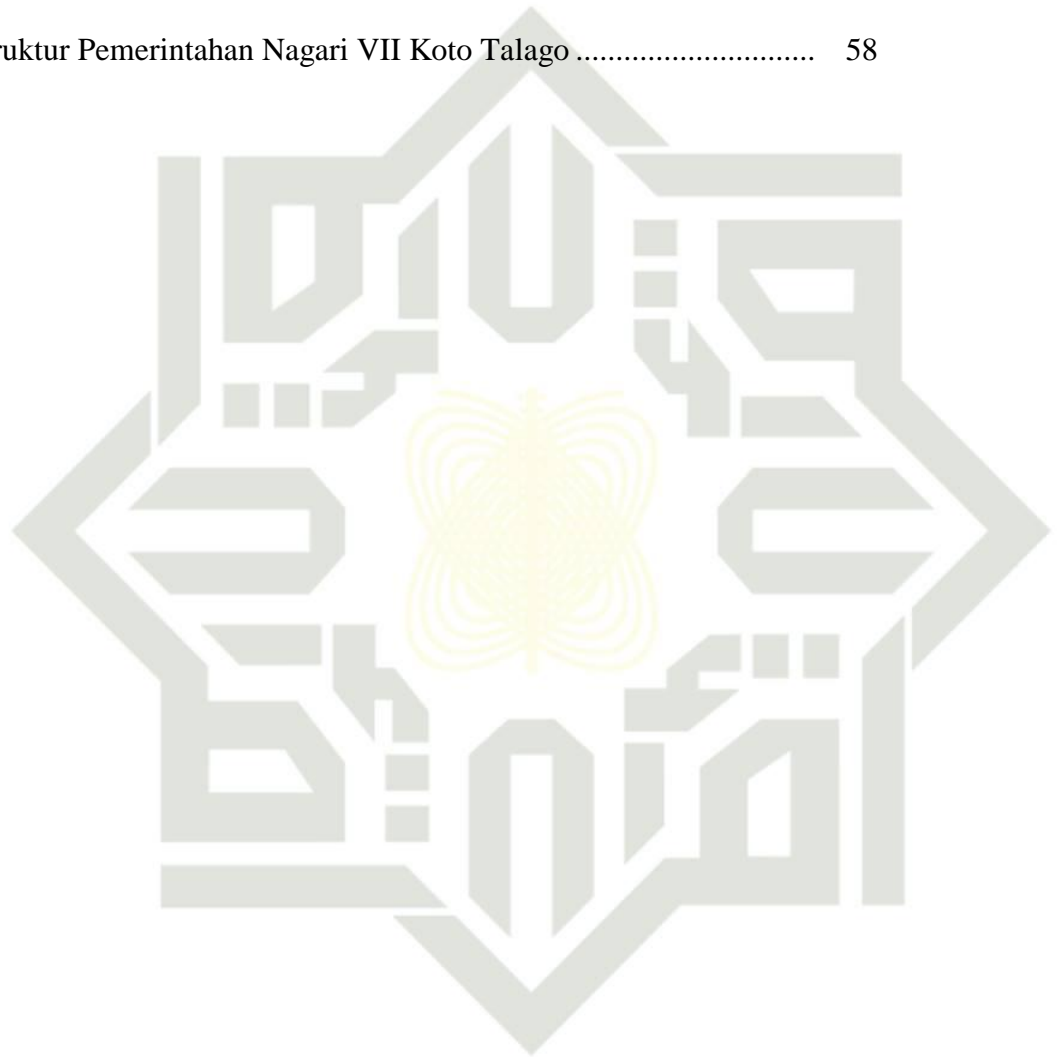
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 5.37 : Tanggapan responden tentang apakah bamus nagari VII Koto talago telah menjalankan fungsinya dengan baik.	112
Tabel 5.38 : Tanggapan responden tentang jumlah anggota bamus nagari VII Koto Talago telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.....	114
Tabel 5.39 : Tanggapan responden tentang bamus Nagari VII Koto talago dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar.....	116
Tabel 5.40 : Tanggapan Responden tentang hak yng diperoleh Bamus Nagari VII Koto Talago dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tidak pernah diselewengkan.....	118
Tabel 5.41: Tanggapan responden tentang anggota bamus Nagari VII Koto talago sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari.....	119
Tabel 5.42 :Tanggapan responden tentang apakah anggota bamus nagari VII koto talago tidak ada yang melakukan rangkap jabatan	120
Tabel 5.43 : Tanggapan responden tentang anggota bamus nagari tidak ada yang menjadi pelaksana proyek nagari.....	122
Tabel 5.44 : Tanggapan responden tentang apakah anggota bamus nagari VII koto talago tidak ada yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat.....	123
Tabel 5.45 : Tanggapan responden tentang anggota Bamus Nagari VII Koto Talago tidak ada yang melakukan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).....	124
Tabel 5.46 : Tanggapan responden tentang anggota Bamus Nagari VII Koto Talago tidak ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
Gambar 4.1 : Peta Nagari VII Koto Talago	47
Gambar 4.2 : Struktur Pemerintahan Nagari VII Koto Talago	58



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Adat bersandi syara-syara bersandi Kitabullah, ini merupakan filosofi yang dimiliki masyarakat Minangkabau sebagai salah satu suku yang mayoritas menempati wilayah bagian barat pulau Sumatera Indonesia. Dalam sejarah tradisional Minangkabau dijelaskan bahwa alam Minangkabau secara geografis terdiri dari dua wilayah utama, yaitu *kawasan Luhak Nan Tigo* dan *Rantau*. Karena terletak di pedalaman, maka Luhak Nan Tigo disebut juga sebagai darek atau darat yang merupakan kawasan pusat atau inti dari wilayah Minangkabau, sedangkan Rantau adalah daerah pinggiran atau daerah yang mengelilingi kawasan pusat tersebut. Luhak Nan Tigo terdiri dari tiga bagian, yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh Kota.

Pada awalnya Nagari di Minangkabau telah mempunyai Limbago atau Lembaga sebagai institusi yang mengatur kehidupan masyarakat nagari dalam bidang adat, budaya, hukum, ekonomi, pertanian, social, pemerintahan, dan agama. Limbago itu disebut dengan Tungku Tigo Sajarang yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai. Pemerintahan Nagari merupakan sebuah pemerintahan tradisional yang diperintah oleh para penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat.

Keberadaan nagari sebagai sistem pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat telah ada sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda ke Indonesia, bahkan dikatakan bahwa sistem pemerintahan nagari diduga telah ada sejak sebelum Adityawarman mendirikan Kerajaan Pagaruyung, suatu kerajaan konfederasi dari nagari-nagari otonom yang ada berada di bumi Minangkabau.

Istilah pemerintahan nagari yang pernah ada tersebut hilang selama masa pemerintahan orde baru dengan diberlakukannya Undang-Undang no.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa di ranah minang dan diganti dengan Sistem Pemerintahan Desa yang diberlakukan secara nasional. Desa yang merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan ini bukan hanya perubahan nama, tetapi diantaranya terdapat perbedaan karakter dan spirit yang menyertainya. Nagari yang berjumlah 543 di Sumatera Barat diubah menjadi 3.138 desa. Perubahan menjadi Desa yang demikian maksudnya agar memperoleh dana bantuan pembangunan desa yang lebih banyak dari pemerintahan pusat.

Setelah runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi yang menuntut adanya demokratisasi diberbagai bidang pada tahun 1998, membawa perubahan dalam memandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Dalam hal ini telah melahirkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, seperti terdapat dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 1 huruf h dan I Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Munculnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah berarti menegaskan bahwa pemberian otonomi kepala daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi itu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaann hubungan pusat dengan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan negara. Dinamika yang selama ini lebih ditentukan oleh kehendak pemerintah pusat beralih kepenentuan dan pengendaliannya oleh masyarakat daerah.

Adanya otonomi daerah ini memunculkan ide untuk mengembalikan sistem pemerintahan di Sumatera Barat kepada sistem pemerintahan nagari, sehingga di daerah Sumatera muncul suatu istilah yang dikenal dengan “kembali ke nagari”. Disebut dengan “kembali ke nagari” karena memang di Sumatera Barat pernah menggunakan suatu sistem pemerintahan nagari yang pernah jaya dan memiliki kesatuan dengan nilai sistem yang demokrasi dengan musyawarah dan mufakat *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat* serta didasari oleh falsafah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adaik mamakai, alam takambang jadi guru*.

Nagari dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul nagari dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Pada pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, Pembentukan Pemerintahan Nagari dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kembalinya Sistem Pemerintahan Nagari sebagai Sistem pemerintahan terendah pengganti desa di Sumatera Barat bukanlah perkara yang mudah, rakyat memang antusias tetapi sebelumnya tentu ada prosesnya. Proses yang menuntut kerja keras dalam hal sosialisasi. Pada saat ini, Kabupaten 50 Kota terdiri dari 13 kecamatan dan 79 Nagari. kenagarian VII Koto Talago memiliki penduduk berjumlah 10.032 jiwa yang terbagi kedalam tujuh Jorong, untuk data mengenai daftar kecamatan dan nagari yang termasuk dalam kabupaten 50 Kota, penulis melampirkan di bagian lampiran. Jumlah penduduk Kenagarian VII Koto Talago tercatat sebanyak 10.032 jiwa.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Kenagarian VII Koto Talago

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Lk	Pr	
1.	Talago	664	733	1.397
2.	Tanjung Jati	998	1.016	2.014
3.	Ampang Godang	637	627	1.264
4.	Padang Jopang	711	735	1.446
5.	Koto Kociak	841	912	1.753
6.	Padang Kandi	485	561	1.046
7.	Sipingai	540	572	1.112
Jumlah		4.876	5.156	10.032

Sumber: Kantor Wali Nagari VII Koto Talago

Perubahan sistem pemerintahan nagari ke desa ternyata menimbulkan dampak negative dalam tatanan kehidupan masyarakat minangkabau, diantaranya:

1. Hilangnya batas-batas nagari atau terpecahnya wilayah nagari sebagai wilayah adat, menyebabkan mengaburnya salah satu syarat adanya suatu nagari. Syarat tersebut adalah *basasok bajarami* yang artinya eksistensi daerah (wilayah) dapat ditandai dengan bendera termasuk batas-batas yang jelas. Enam syarat yang lainnya: *bapandam bapakuburan, balabuah*

batapian, bakorong bakampuang, barumah batanggo, basawah baladang, babalai bamusajik.

2. Sistem demokrasi masyarakat minang dalam memilih wali nagari yang merupakan suatu tradisi yang amat baik di minang tidak lagi diteruskan dalam pemilihan desa. Kepala desa/lurah ditunjuk dari atas, masyarakat tidak berperan aktif dalam pemilihan kepala desa.
3. Masyarakat kehilangan tokoh angku palo (sebutan untuk wali nagari) yang tidak dapat digantikan oleh kepala desa atau lurah. Angku palo pada umumnya adalah tokoh kharismatik yang amat dihormati yang menjadi tauladan dan panutan anak nagari. Angku palo tidak saja menguasai seluk beluk pemerintahan nagari tetapi juga memahami adat istiadat nagari dan taat beragama.
4. Aspirasi anak nagari dalam pembangunan kehilangan wadah asli yaitu nagari. Sedangkan desa/lurah bahkan KAN tidak mampu menggantikan fungsi tersebut.
5. Generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak mengetahui dan memahami apa yang dikatakan dengan nagari terutama bagi yang tidak sempat mempelajari BAM.

Undang-Undang no. 5 tahun 1979 merupakan landasan pengaturan pemerintahan desa. Dengan sistem pemerintahan desa, sistem pemerintahan nasional secara vertikal sampai ke desa, sehingga menimbulkan konsekuensi terjadinya penyeragaman pemerintahan desa. Kondisi ini mempunyai dampak kurang efektifnya penerapan sistem ini terutama daerah Sumatera Barat karena didalam sistem ini mempunyai kelemahan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Desa yang sebelumnya merupakan wilayah nagari telah membatasi secara administrative potensi sumber daya yang ada, sehingga desa mengalami kesulitan dalam pengembangan dan pembangunan desa itu sendiri.
2. Terjadinya penurunan ikatan sosial masyarakat nagari yang dulunya sudah baik, sehingga mengakibatkan timbulnya beberapa konflik ditengah masyarakat
3. Secara sosial budaya, masyarakat yang berada di perantauan memperlihatkan kurangnya dukungan terhadap pemerintahan desa, karena masyarakat perantauan lebih merasa terikat dengan nagari.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, pasal 4 Ayat (1) menyebutkan dalam rangka pelaksanaan Asas Desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan daerah Kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Peluang penerapan kembali Sistem Pemerintahan Nagari terbuka lebar dengan semangat “Babaliak ka Nagari” sebagai unit pemerintahan terendah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut daerah diberikan kesempatan untuk berfikir kreatif untuk kemakmuran dan kesejahteraan daerah masing-masing. Bahkan daerah juga diberikan wewenang untuk membentuk dan menentukan sendiri sistem pemerintah terendah di daerahnya sesuai dengan karakter daerah masing-masing.

Disamping adanya perubahan perundang-undangan dalam pengaturan nagari, tuntutan perubahan pengaturan tentang penyelenggaraan pemerintahan nagari juga memperhatikan dinamika yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan hal-hal yang timbul dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti tumpang tindihnya fungsi lembaga-lembaga yang ada di nagari, kurang harmonisnya hubungan antar lembaga nagari dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan nagari dengan memperhatikan tuntutan perubahan perundang-undangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari tersebut maka dikeluarkanlah peraturan daerah Kabupaten 50 kota nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari yang merupakan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari

Semenjak ditetapkan peraturan daerah kabupaten 50 kota nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari, maka jalannya pemerintahan seluruh nagari di kabupaten 50 kota berpedoman pada peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan nagari dilaksanakan oleh wali nagari sebagai pimpinan eksekutif dibantu oleh Badan Musyawarah (Bamus) nagari sebagai legislative. Pelaksanaan sistem pemerintahan merupakan salah satu bentuk otonomi yang diberikan pemerintah pusat, karena dalam sistem pemerintahannya, nagari berhak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Terlihat bahwa nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa. Beragamnya kebijakan serta berganti-gantinya peraturan dan ketentuan menyangkut Nagari dari waktu ke waktu ternyata tidak membawa dinamika nagari ke arah yang lebih baik. Justru secara mendasar semua peraturan tersebut telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebabkan mudarnya nilai-nilai lokal adat Minangkabau dalam masyarakat nagari yang pada dasarnya demokratis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menetapkan judul **Analisis Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yang perlu untuk dikaji dan dibahas, adapun masalah yang penulis rumuskan adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah khasanah pengetahuan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tentang Pemerintahan Nagari yang diterapkan di wilayah Minangkabau, khususnya pada Nagari VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
2. Memberikan kontribusi dan masukan bagi VII Koto Talago dan pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Nagari
3. Memberi wawasan yang sangat berarti bagi peneneliti dalam memahami konsep Sistem Pemerintahan Nagari di Minangkabau, khususnya pada Nagari VII Koto Talago Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat
4. Serta dapat menjadi bahan masukan maupun rujukan bagi penelitian lainnya

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam bab bahasan, dimana masing-masing bab di bagi lagi menjadi Sub-Bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sehingga dapat ditarik suatu hipotesis

: Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data

: Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, jumlah penduduk, organisasi kemasyarakatan, struktur Sistem Pemerintahan Nagari VII Koto Talago

: Pembahasan dan Hasil

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

: Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab sebelumnya.

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Teori Sistem

Secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Latin "*Systema*" dan bahasa Yunani "*Sustema*" yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai tujuan. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak.

Menurut pamudji (2013; 1), sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau teroganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Keseluruhan yang utuh tersebut mencakup didalamnya yaitu berbagai macam komponen yang termasuk sistem. Sistem tersebut memiliki fungsi masing-masing dan berkaitan antara satu sistem bersama dengan sistem lainnya untuk mencapai tujuan.

Menurut David Easton (2004:70), sistem adalah suatu model yang menjelaskan hubungan tertentu antara sub-sub sistem dengan sistem sebagai suatu unit (yang bisa saja berupa suatu masyarakat, serikat buruh, organisasi pemerintah). Easton juga meringkas ciri-ciri sistem sebagai berikut:

1. Sistem mempunyai batas yang didalamnya ada saling hubungan fungsional yang terutama dilandasi oleh beberapa bentuk komunikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem terbagi kedalam sub-sub sistem yang satu sama lainnya saling melakukan pertukaran (seperti antara desa dengan pemerintah daerah atau antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat)
3. Sistem bisa membuat kode, yaitu menerima informasi. Mempelajari dan menerjemahkan masukan kedalam beberapa jenis keluaran.

Sedangkan menurut Prof. Sumantri (2013:1), sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidaknya sistem sudah terwujud akan mendapat gangguan.

Wagiono Ismail (2016:40), menjelaskan sifat-sifat dari suatu sistem adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan. Suatu sistem bersifat dinamis dan bergerak kearah pencapaian tujuan berupa penciptaan nilai serta menghasilkan output yang bernilai tinggi.
2. Kesatuan usaha. Disebut juga dengan istilah wholism dalam konsep sistem. Mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem yakni hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagiannya. Konsep semacam ini dikenal dengan Synergy (kekuatan yang mengikat sistem)
3. Keterbukaan terhadap lingkungan. Makin terbuka sistem, makin terpengaruh perilakunya oleh lingkungan sekitar. Sebaliknya makin tertutup suatu sistem makin indenpenden dari lingkungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Transformasi. Merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem
5. Hubungan antar bagian. Aspek ini penting sekali dalam setiap proses sistem karena cirri pokok sistem adalah bagian-bagian yang spesialis dan berkaitan satu dengan yang lain
6. Mekanisme pengendalian. Merupakan alat pengarah dan penilai sampai sejauh mana suatu sistem bergerak secara terarah dalam rangka mencapai tujuannya.

Jadi, sistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait-mengait satu sama lain. Bagian atau anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia adalah salah satu contoh sistem, dan anak cabangnya adalah sistem pemerintahan daerah. Kemudian seterusnya sistem pemerintahan desa dan kelurahan. Kerja sama antar subsistem akan menimbulkan hubungan yang sinergis.

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu, juga sebagai sistem untuk menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya. Menurut Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih (2018: 122), pemerintah adalah alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dan merupakan alat juga dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Secara etimologi desa berasal dari bahasa Sansekerta “*Dhesi*” yang berarti tanah kelahiran. Istilah ini telah ada sejak tahun 1114 ketika nusantara masih terdiri dari beberapa kerajaan. Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. Definisi desa menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan nomina (kata benda) yang berarti:

1. Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung, dusun.
2. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota)
3. *kl* tempat, tanah, daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Paul H. Landis, desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam dan kekayaan alam

Menurut Widjaja menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa,

landasan pemikiran dalam mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat masyarakat.

Menurut Saporin pemerintahan desa merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan dibawah pimpinan seorang kepala Desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa, yakni kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 perangkat desa terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa
- b. Pelaksana kewilayahan
- c. Pelaksana teknis

Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/walikota. Perangkat desa melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sementara itu, sekretaris desa yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diisi oleh bukan PNS namun secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pemerintahan Nagari

2.3.1. Nagari

Kata nagari berasal dari bahasa sanskerta yaitu “Nagari”, yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu pulalah yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku diantara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk Negara yang berpemerintahan sendiri.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 memberikan definisi nagari sebagai kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (Matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat. Jadi penyebutan nagari tersebut hanya berlaku di daerah Provinsi Sumatera Barat dan nagari termasuk kedalam desa adat.

Menurut A.A Navis menyatakan pengertian nagari sebagai suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk (penghulu tua) selaku pimpinan pemerintahan tertinggi. M Amir Sutan menyebutkan bahwa keterangan terbaik mengenai asal usul nagari diberikan oleh ahli adat de rooy. Dia menuliskan bahwa nagari yang yang tertua adalah Nagari Pariangan Padang Panjang,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Pariangan rakyat mengembara kemana-mana dan mendirikan tempat tinggal baru yang akhirnya membentuk kampung.

Perkampungan ini disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang lagi menjadi *Koto* dan *Koto* berkembang menjadi *Nagari*. A.A Navis menguraikan nagari yang empat itu sebagai berikut:

- a. Taratak, yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian didalamnya. Pimpinannya disebut *Tuo* (tua/ketua), belum punya penghulu oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong.
- b. Dusun merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah, rumah gadang dua gonjong tetapi belum mempunyai penghulu dan pimpinan pemerintahannya disebut *Tuo Dusun*.
- c. Koto merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari dan pimpinan terletak ditangan *Penghulu*, tetapi balairung tidak mempunyai dinding.
- d. Nagari yaitu pemukiman yang memiliki adat kelengkapan pemerintahan yang sempurna, didiami sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan *penghulu Pucuk* sebagai pimpinan pemerintahan yang tertinggi.

Setiap pendirian sebuah nagari memiliki empat syarat yang diungkapkan dalam sebuah pepatah adat yang berbunyi "*Nagari kaampeh suku, dalam suku babuah paruik, kampuang nan batuo, rumah batungganai*" (nagari keempat suku,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suku berbuah perut, kampung bertua, dan rumah bertungganai). Artinya setiap nagari yang didirikan harus terdiri dari:

- a. Mempunyai empat buah suku
- b. Setiap suku mempunyai beberapa buah perut (kaum dari turunan Ibu)
- c. Mempunyai penghulu suku yang akan menjadi pemegang pemerintahan nagari secara kolektif
- d. Rumah batungganai yaitu mempunyai kepala kaum yang disebut dengan penghulu kaum dari keluarga yang mendiami suatu rumah

Dari hukum adat diatas telah dituangkan dalam Undang-Undang Nagari tentang syarat pendirian sebuah nagari, yaitu:

- a. Mempunyai sedikitnya empat suku
- b. Mempunyai balairung untuk bersidang
- c. Mempunyai sebuah masjid untuk beribadah
- d. Mempunyai tepian untuk mandi

Dua orang ahli pengatur tata alam Minangkabau, yang oleh Z.A. Dt. Pamuncak Alam di dalam bukunya: Undang-Undang orang didalam nagari minangkabau (dalam Chairul Anwar, 1997: 22-23) beliau namakan filosof adat minangkabau yaitu Dt. Katumanggungan beserta Dt. Parpatih Nan Sabatang telah mmebuat aturan-aturan bagi alam minangkabau, yang aturan-aturan beliau itu termasuk didalam lingkungan yang dinamakan adat yang diadatkan, yang salah satu bagian dari aturan-aturan tersebut ialah terkenal dengan nama *Nagari Nan Ampek*, ada juga disebut dengan *Koto nan Ampek* atau dipendek menjadi koto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari beberapa pendapat diatas dapat dikemukakan secara kongkrit bahwa nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat minangkabau yang mempunyai batasan-batasan alam yang jelas, dibawah pimpinan penghulu, mempunyai aturan-aturan tersendiri serta menjalankan pengurusan berdasarkan musyawarah mufakat. Dilihat dari struktur wilayahnya, maka suatu nagari terdiri dari beberapa jorong yang dikepalai oleh wali jorong yang bertanggung jawab pada wali nagari.

Jorong merupakan unit-unit lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan nagari. Jorong umumnya merupakan bekas desa yang ada dalam wilayah suatu nagari, namun tidak menutup kemungkinan desa dipecah menjadi beberapa jorong jika bekas desa tersebut memiliki wilayah yang luas atau atas dasar pertimbangan jumlah penduduk.

2.3.2. Pemerintahan Nagari

Secara historis pemerintahan nagari merupakan suatu pemerintahan tradisional yang di perintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah kerapatan adat. Penghulu-penghulu tersebut dibantu oleh para manti (orang cerdik yang dipercaya oleh penghulu), malin (alim ulama), dan dubalang (hulubalang/keamanan). Pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah yang menggantikan pemerintahan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota nomor 2 tahun 2013 pasal 3 ayat (4) dijelaskan pembentukan nagari harus memenuhi persyaratan seperti berikut:

- a. Batas usia minimal nagari 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukannya
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga
- c. Luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan
- d. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam nagari
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat
- f. Memiliki potensi nagari
- g. Batas pemerintahan nagari yang dinyatakan dalam bentuk peta batas pemerintahan nagari yang disepakati oleh pemerintahan nagari yang berbatasan
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public
- i. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan nagari

1) Walinagari

Wali Nagari merupakan Pemerintahan Nagari yang orangnya dipilih secara langsung oleh rakyat nagari. Walinagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013, walinagari mempunyai wewenang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
- b. Menetapkan peraturan nagari bersama dengan Bamus Nagari
- c. Merencanakan pembangunan nagari
- d. Menyusun rancangan APB Nagari
- e. Menfasilitasi kehidupan masyarakat nagari
- f. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian nagari
- g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
- h. Mengembangkan teknologi tepat guna
- i. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan

2) Sekretariat Nagari

Sekretariat Nagari dipimpin oleh Sekretaris Nagari dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Wali Nagari dalam bidang Administrasi Pemerintahan. Sekretaris Nagari mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya serta mengkoordinasikan tugas-tugas Kepala Urusan. Sekretaris Nagari dalam membantu Wali Nagari mempunyai tugas :

- a. Memberikan saran dan pendapat kepada Wali Nagari
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan sevckretariat Nagari
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat Nagari dan keadaan umum Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Merumuskan program kegiatan Nagari
- e. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan
- f. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat
- g. Menyusun rancangan RAPBNagari
- h. Mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan Nagari
- i. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan
- j. Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Nagari
- k. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan
- l. Melaksanakan tugas Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan
- m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan Wali Nagari dan tugas lain sesuai peraturan prundang –undangan.

3) Perangkat Kewilayahan

Tugas pelaksana kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4) Kepala Urusan Pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Walinagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum nagari. Fungsi kepala urusan pemerintahan meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
- b. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan nagari dan keputusan walinagari
- c. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
- d. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi nagari
- e. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Kepala Urusan Pembangunan

Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas pokok membantu walinagari dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi nagari, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Fungsi kepala urusan pembangunan meliputi:

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walinagari

6) Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan

Kepala urusan administrasi bertugas membantu sekretaris nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Fungsi kepala urusan administrasi meliputi:

- a. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan nagari
- b. Melaksanakan pencatatan inventaris nagari
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum

- d. Sebagai penyedia, menyimpan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Mengelola administrasi perangkat nagari
- f. Mempersiapkan bahan-bahan laporan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris nagari

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris nagari melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan nagari, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari serta laporan keuangan yang dibutuhkan nagari. Fungsi kepala urusan keuangan meliputi:

- a. Mengelola administrasi keuangan desa
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari
- c. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris nagari.

2.4 Perbedaan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Nagari

Sistem pemerintahan desa yang pernah diterapkan di Sumatera Barat pada masa Orde Baru sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dimana, masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan norma di Minangkabau seolah-olah menghilang seiring dengan bergesernya identitas masyarakat Minangkabau. Berbeda halnya dengan saat pemerintahan nagari diberlakukan. Dimana masyarakat Minangkabau sangat menghargai adat istiadat serta pemimpin informal sangat diperhitungkan keberadaannya. Berikut perbandingan sistem pemerintahan desa dengan sistem pemerintahan nagari:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.1

Perbandingan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kenagarian

No	Pemerintahan Desa	Pemerintahan Nagari
1.	Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya mendominasi kehidupan masyarakat	Walinagari dan pemerintah informal saling bersinergi membangun nagari
2.	Beberapa Desa menjadi maju karena adanya bantuan desa	Kurangnya dana yang didapat nagari, karena tidak sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk
3.	Jorong dinagari dijadikan satu desa	Jorong yang menjadi desa bergabung kembali ke nagari asalnya, namun ada juga desa yang tidak mau kembali ke nagari asalnya
4.	Lebih cepatnya layanan satu Desa	Layanan pemerintahan kurang maksimal, karena jarak yang jauh
5.	Dana Desa Diturunkan Bupati melalui Camat	Dana yang turun dari kabupaten lebih transparan dibandingkan dana pembangunan desa dulu (sistem transfer langsung)
6.	Kepala Desa di SK-kan dan bertanggung langsung kepada Bupati	Walingari di SK-kan bertanggungjawab langsung kepada Bupati
7.	tidak dilibatkannya Pemimpin informal (Tiga Tungku Sajarang) dalam mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat, dan hanya disertakan dalam LMD ketika pemilihan Kepala Desa	Pemilihan walinagari lebih ketat dibandingkan kepala desa
8.	Masyarakat kurang dilibatkan dalam pembangunan, proyek ditentukan langsung oleh pemerintahan Daerah yang diserahkan kepada LKMD	Pembangunan ditentukan sendiri oleh pemerintah nagari bersama masyarakat
9.	Sering terjadi korupsi pembangunan	Lebih dituntut kreatifitas dan inisiatif aparatur nagari dalam pembangunan
10.	Adat istiadat menjadi tertinggal	Mengembalikan adat istiadat yang tertinggal dan memegang teguh asa kegotong-royongan untuk kemajuan nagari

Sumber: Data Olahan Lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.5 Pandangan Islam Terhadap Pemerintahan

Bentuk pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang merujuk kepada syariat. Konstitusinya tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dan hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabawy, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, mu'amalah maupun berbagai macam hubungan. Oleh karena itu hukum yang berlaku harus selalu bersumber dan merujuk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulil amri yang dipilih oleh rakyat, untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan guna terciptanya kondisi tersebut adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata. Sesungguhnya apa yang digambarkan oleh orang-orang semacam yang menerbitkan buku tersebut, hanyalah manifestasi dari pada imajinasi ketakutan mereka terhadap penerapan syariat.

Konsep pemerintahan Islam adalah sebagaimana dijelaskan dalam nash Al-Qur'an, yakni pada surat An-Nisaa' ayat 58-59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa': 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Bahwa pemerintahan Islam berdasarkan kepada tiga aturan penting yakni taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Taat kepada yang memegang kekuasaan di antara umat dan mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, jika terjadi perselisihan dengan pihak yang berkuasa.

Ayat ini turun berkaitan dengan Utsman bin Thalhah (Abu Thalhah). Ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah darinya sewaktu penaklukan Mekkah untuk masuk ke dalam ka'bah membersihkan berhala-berhala di dalamnya, kemudian menutupnya kembali dan menyerahkan kunci itu kepadanya. Sambil mengucapkan "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya". Kendatipun ada Sahabat Nabi yang lain memohon kunci itu, tetapi beliau tidak memberikan dan mengembalikan kunci itu kepada yang berhak menerimanya, sebagai penjaga ka'bah.

Kata amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mu'min berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa amanah ini meliputi ibadah Sholat, Zakat, Puasa, Kifarat dan semua jenis Nazar. Amanah juga termasuk yang menyangkut hak-hak Allah Swt atas hamba-hamba-Nya yang dipercayakan kepada seseorang yang berupa titipan. Oleh karena suatu titipan hendaknya ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini memerintahkan kepada para penguasa atau pemangku jabatan yang berwenang dalam menetapkan suatu hukum agar menetapkan hukum secara adil, walau terhadap individu atau kelompok yang berseberangan pendapat dengan mereka, kerana keadilan mendekatkan pelakunya kepada ketaqwaan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa wajiblah atas penguasa menyerahkan suatu tugas dari tugas-tugas kaum Muslimin kepada orang yang cakap/kompeten untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebab Rasulullah menyatakan ” Barang siapa memegang kuasa dari suatu urusan kaum Muslimin, lalu ia berikan satu jabatan kepada seseorang, padahal ia tahu bahwa ada lagi orang yang lebih cakap untuk kaum Muslimin daripada orang yang diangkatnya itu, maka berkhianatlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya dan kaum Muslimin”.(HR. Al-Hakim).

2.6. Penelitian Terdahulu

Basnida Efrizal dalam tesisnya yang berjudul “*Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari: Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten 50 Kota*”. Penelitian ini berfokus pada tiga faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi motivasi untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, diantaranya: terjadinya krisis kepemimpinan di tingkat Desa dan Nagari, terjadinya disintegrasi sosial masyarakat nagari dan terlantarnya pelayanan nagari. penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten 50 kota dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam menata pemerintahan terendah untuk menyikapi aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasilnya bahwa sepanjang sejarah Minangkabau, belum ada ideology di tingkat Supranagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional minangkabau, maka dibentuk pemerintahan terendah di Kabupaten 50 kota dengan kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari, Karennan sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh **Darwianis** dan telah diterbitkan dalam jurnal PPKn dan Hukum yang berjudul “Tindak Lanjut Kebijakan Kembali ke Nagari dan Ke Surau Serta Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Adat Keagamaan Masyarakat”. Penelitian tersebut bertolak dari dasar pemikiran bahwa dua kebijakan kembali ke nagari dan gerakan kembali ke surau merupakan dua sisi mata uang yang memiliki substansi nilai yang sama yaitu tatanan kehidupan yang berbasiskan *Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah*. Tujuan penelitiannya adalah untuk menajaki sikap pemerintah nagari tentang keharusan kembali ke Surau sebagai konsekuensi logis dari kebijakan kembali ke nagari

Hasil analisa menunjukkan bahwa walaupun kebijakan kembali ke nagari dan ke surau disambut baik oleh masyarakat, tetapi sikap setuju atau mendukung kebijakan tersebut bersifat pasif dan belum ada upaya nyata yang signifikan dan adanya perubahan positif pada segi tertentu dari kehidupan sosial adat-keagamaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan **Refdiana** dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari dengan Diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi kasus di Nagari Sicincin,

kaupaten Padang Pariaman)”. Penelitian ini melihat bahwa Pemerintahan Nagari telah mengalami bongkar pasang yang sedemikian rupa hingga akhirnya diberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana akan berpengaruh pada prinsip “*Babaliak Ka Nagari*” di Sumatera Barat timbul masalah baru khususnya pada pelaksanaannya sistem pemerintahan nagari yang tidak bisa disamakan dengan pemerintahan desa dan dengan dikeluarkannya undang ini membuat dirugikan dari segi keuangan.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Sicincin, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Sicincin dengan diberlakukannya Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari. faktor pendukung adanya dukungan dari pemerintahan pusat dan juga masyarakat hukum adat dan faktor penghambat kurangnya kualitas SDM, anggaran nagari kurang mencukupi serta sulitnya mendapatkan figure walinagari dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program-program pemerintahan nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel. 2.2
Review Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Basnida Efrizal	Dari Sistem Pemerintahan Desa Kembali ke Sistem Pemerintahan Nagari: Studi di Desa Kampung Baru dan Desa Situjuh Ladang Laweh Kabupaten 50 Kota	Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk kembali ke Sistem pemerintahan nagari di Kabupaten 50 Kota dan dapat memberikan manfaat bagi pemerintahan daerah dalam menata pemerintahan terendah dalam menyikapi aspirasi masyarakat	Bahwa sepanjang seajarah minangkabau, belum ada ideology di tingkat Supranagari yang secara radikal menghapus sistem otoritas tradisional minnagkabau, maka dibentuk pemerintahan terendah di Kabupaten 50 kota dengan kembali ke Sistem pemerintahan nagari, karena sistem itu berakar dari kekuatan dasar-dasar sosiologis, ekonomis dan politis
2.	Darwianis	Tindak Lanjut Kebijakan Kembali ke Nagari dan Ke Surau serta Dampaknya terhadap Kehidupan Sosial Adat Keagamaan Masyarakat	Untuk menjajaki sikap pemerintah nagari tentang keharusan kembali kesurau sebagai Konsekuensi logis dari kebijakan Kembali ke Nagari	Bahwa walaupun kebijakan kembali ke nagari dan ke surau disambut baik oleh masyarakat, tetapi sikap setuju atau mendukung kebijakan tersebut bersifat pasif dan belum ada upaya nyata yang signifikan dan adanya perubahan positif pada segi tertentu dari kehidupan sosial adat keagamaan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif
3.	Refdiana	Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Nagari dengan Diberlakukan	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari dengan Sicincin, faktor pendukung dan	Bahwa pemerintahan nagari dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dalam

	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa: Studi kasus di Nagari Sicincin Kabupaten Padang Pariman	penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan nagari Sicincin dengan diberlakukannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	menyelenggarakan pemerintahan nagari, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat nagari.
--	--	---	--

Dari ketiga penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, penelitian pasca kembali ke nagari masih berkuat pada romantika bahwa nagari pernah di hegemoni oleh kekuasaan yang bernama Negara pada masa orde baru. Selain itu, sebagian penelitian yang lain sibuk memikirkan konsep apa yang cocok untuk diterapkan pada pemerintahan nagari sekarang. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan penulis lebih kepada bagaimana penerapan sistem pemerintahan nagari yang ada sekarang, apakah ada sisa-sisa pemerintahan desa yang masih terbawa ke pemerintahan nagari sejak *Babaliak ka nagari*.

2.7. Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan definisi konsep. Konsep merupakan suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, objek, ide atau akal pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Menurut Iqbal Hasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2004:12) konsep adalah istilah, terdiri dari beberapa suku kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu.

Adapun definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sistem adalah satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain. Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pemerintahan nagari di VII Koto Talago
2. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2.8. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan unsur-unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variable, sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variable tersebut.

Menurut Singarimbun konsep oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable. Definisi operasional berisi tentang indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variable. Variable penelitian pada penulisan ini merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Konsep Operasionalnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3
Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari	Pemerintahan Nagari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pemerintahan nagari 2. Hak pemerintah nagari 3. Kewajiban pemerintah nagari 4. Penyelenggaraan pemerintahan nagari 5. Struktur pemerintahan nagari
	Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan dan fungsi Bamus Nagari 2. Tugas Bamus Nagari 3. Wewenang Bamus Nagari 4. Hak Bamus Nagari 5. Kewajiban Bamus Nagari 6. Larangan Bamus Nagari 7. Struktur Bamus Nagari

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 tahun 2013

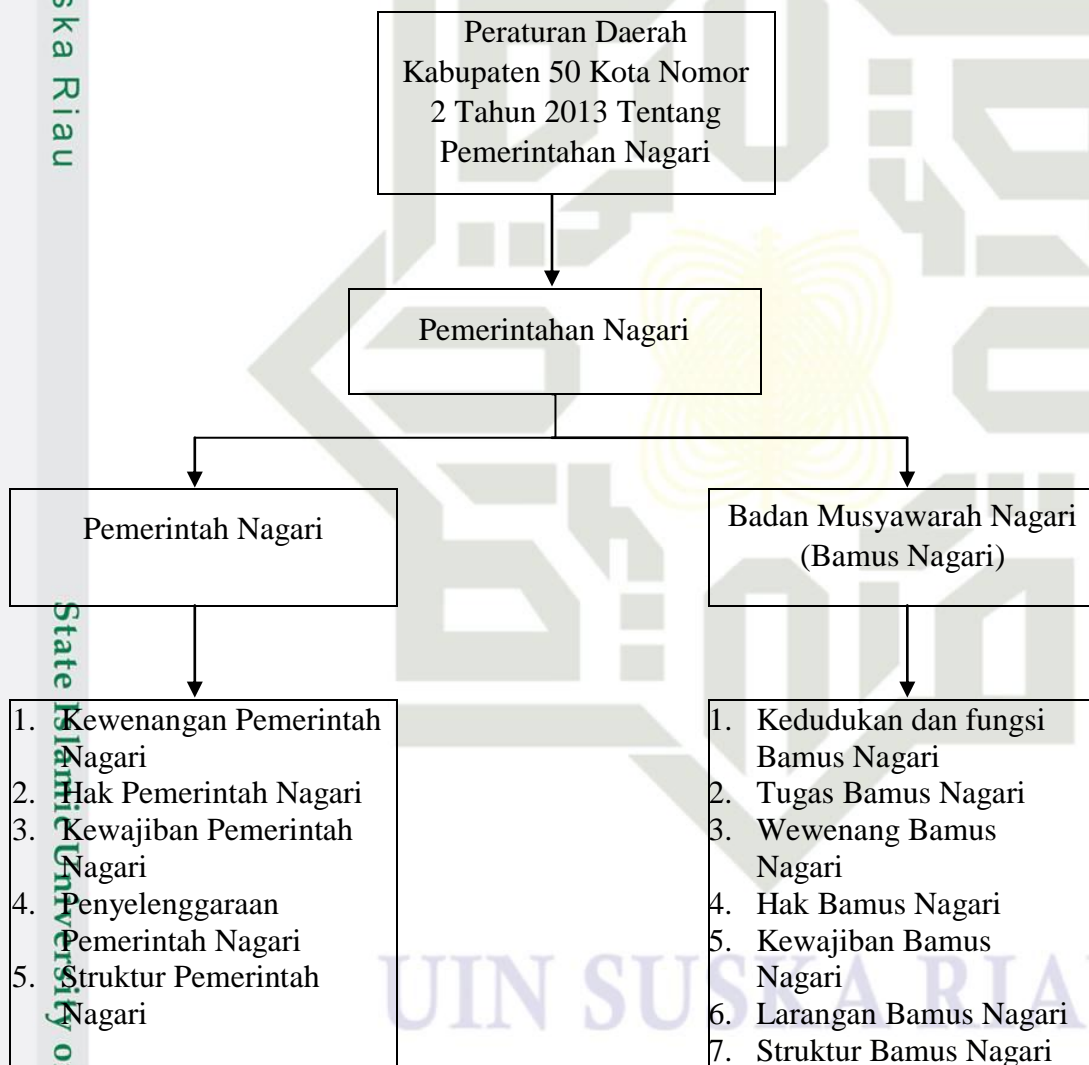
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berikut gambar dari variable Penelitian Sistem Pemerintahan Nagari di Kabupaten 50 Kota.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sumber Data

Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:15) data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka menurut sugiyono (2011: 156) pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini antara lain berupa:

3.1.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Iqbal Hasan, 2005:19). Data ini diperoleh melalui pengamatan dan hasil dari wawancara pada sampel penelitian. Data tersebut berupa beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber mengenai sistem pemerintahan nagari

3.1.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti untuk melengkapi data primer yang di peroleh dari instansi terkait seperti dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah yang sedang diteliti.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan penulis ini mengetahui bagaimana Sistem Pemerintahan Nagari Setelah berlakunya peraturan daerah nomor 7 tahun 2018.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, Emzir (2010: 6) menyatakan bahwa pengumpulan data cenderung terdiri dari:

1. Data dalam bentuk pertanyaan umum untuk memungkinkan partisipan menghasilkan jawaban-jawaban;
2. Data kata-kata (teks) atau data gambar (picture);
3. Informasi dari sejumlah kecil individu atau situs.

Untuk melakukan penelitian terhadap Sistem Pemerintahan Nagari VII Koto Talago, Kecamatan Guguak setelah berlakunya Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2007, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu:

3.3.1 Observasi

Alat pengumpulan datanya disebut panduan observasi. Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku (Faisal, 2005: 52)

3.3.2 Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2008:162).

3.3.3 Wawancara

Metode wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disikitar pendapat dan keyakinan menurut Hasan dalam Emzir (2010: 50). Dalam wawancara, alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden (Faisal, 2005: 52).

3.3.4 Dokumentasi

Metode dokumentasi, alat pengumpulan datanya disebut form pencatatan dokumen. Dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen tersedia. Juga termasuk dokumen-dokumen ekspresif, seperti biografi, autobiografi, surat-surat, dan buku harian. Dan termasuk juga laporan media massa baik melalui surat berkabar, majalah, radio, televisi, maupun media cetak dan elektronis lainnya (Faisal, 2005: 53).

3.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi, statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi (pendekatan) terhadap populasi tempatnya berasal. Populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 61).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparatur pemerintahan nagari di Kenagarian VII Koto talago yang berjumlah 10 orang. Berhubung populasinya tidak terlalu banyak maka peneliti tidak mengambil sampel, semua subjek akan diteliti. Penelitian ini disebut juga penelitian populasi yang menggunakan teknik sampelnya adalah teknik sampling jenuh

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2015: 65).

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. (Sugiyono, 2008: 96).

Adapun populasi dan sampel dari pemerintahan nagari di kenagarian VII Koto Talago Kabupaten 50 Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Populasi dan Sampel dari Aparat Pemerintah Nagari,
Bamus Nagari dan Tokoh Masyarakat Kenagarian VII Koto Talago

No	Klasifikasi	Populasi	Sampel
1.	Wali Nagari	1 Orang	1 Orang
2.	Perangkat Wilayah (Jorong)	7 Orang	7 Orang
3.	Bamus Nagari	1 Orang	1 Orang
4.	Tokoh Adat (Penghulu)	1 Orang	1 Orang
Jumlah		10 Orang	10 Orang

Sumber: Data Olahan lapangan 2019

3.5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis *Nonprobability Sampling*. *Nonprobability Sampling* mencakup semua metode pemilihan sampel tidak dengan prosedur “chance” atau tidak dengan probability terpilih yang diketahui untuk setiap unit (Abuzar Asra dan Achmad Prasetyo, 2015: 35).

Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015: 65). Teknik yang dipilih dalam *Nonprobability Sampling* ini yaitu dengan Sampling Jenuh merupakan teknik penarikan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi kecil, kurang dari 30 orang (Sugiyono, 2008: 96).

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah aparat pemerintah Kenagarian VII Koto Talago yaitu sebanyak 10 orang yang terdiri dari Wali nagari, Perangkat Wilayah (Jorong), Bamus Nagari serta Tokoh Masyarakat. Teknik penarikan sampel ini menggunakan metode sampel jenuh. Metode sampel jenuh

adalah teknik penentuak sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1. Pengertian Analisis Data

Analisis data pada dasarnya dapat diartikan sebagai berikut: menurut Patton dalam Hasan (2010:29), analisis data adalah proses mengatur urusan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

3.6.2. Tujuan Analisis Data

Tujuan dari analisis data antara lain:

1. Memecahkan masalah-masalah penelitian
2. Memperlihatkan hubungan antar fenomena yang terdapat dalam penelitian
3. Memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian
4. Bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebijakan penelitian selanjutnya

Analisis kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik, ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pengecekan dan tabulasi. Dalam hal ini, sekedar membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penafsiran (Iqbal Hasan, 2010: 29-30).

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat

Beberapa abad yang lalu pembesar adat yang ada di Pariangan Padang Panjang mulai mengembangkan daerah untuk kehidupan anak nagari dan untuk luak Lima Puluah di tugaskan mencari daerah yang subur sebanyak 50 (lima Puluh) orang yang dipimpin oleh orang ompek jinih yang terdiri dari Penghulu, Cadiak Pandai, Alam Ulama, Dubalang dan berangkatlah rombongan ini menuju arah utara setelah sampai di suatu tempat hari malam rombongan ini beristirahat, pada pagi harinya rombongan ini berkumpul mengadakan musyawarah untuk bermufakat kemana arah perjalanan yang akan dituju, tetapi pada hari itu hanya 45 (empat puluh lima) orang yang hadir, sudah jadi *Luak Lima puluh* artinya kurang lima puluh.

Anggota rombongan tidak ada yang yang tahu kemana perginya yang berlima itu, sehingga mereka saling bertanya dan jawaban mereka yang ditanya hampir sama yaitu *antah* artinya tidak tahu. Maka padang tersebut diberi nama Padang Siantah yang terletak di Situjuah dengan Piladang dan itu lah ulayat Rajo Nan Balimo dan sekarang sudah dikapling oleh masyarakat dan pendatang disana.

Rombongan yang tinggal 45 orang ini bermufakat dengan keputusan 21 (dua puluh satu) orang ke arah timur tepatnya di Aia Tobik dan 24 (dua puluh empat) orang meneruskan perjalanan ke arah utara dan setelah sampai ke suatu tempat beliau berselisih pendapat arah tujuannya yang sampai sekarang disebut Padang Sindia karena rombongan saling *sindia manyindia*. Kemudian rombongan bermusyawarah

dengan keputusan 7 orang berangkat ke Talago yang sekarang dipimpin oleh seorang penghulu Dt. Bandari Hitam.

Rombongan yang 7 (tujuh) orang sudah berada di Talago membentuk taratak, dusun, koto dan akhirnya nagari. selanjutnya setelah terbentuk nagari maka dibentuklah sistem pemerintahan. Pucuk pimpinan adat dipegang oleh Datuak Paduko Tuan. Setelah penduduk berkembang di Talago selanjutnya kelompok masyarakat tersebut pindah ke Ompang Godang.

Nama Ompang Godang Berasal dari Kenyataan yang ada yaitu *dibaruah* sebelah utara Ompang Godang ada masa dahulunya *Ompangan aia* sangat *Godang* dizaman tersebut maka diberilah koto tersebut dengan Nama Ompang Godang. Disana mereka mendirikan pucuk adat sendiri yang dipimpin oleh seorang Datuk Pucuk yang bernama Datuk Karaing. Kebesaran Datuk Karaing ditunjukkan melalui kekuasaannya atas wilayah atau *rimbo*.

Setelah berkembangnya masyarakat di Talago dan Ompang Godang maka dikembangkan wilayah ke arah barat yang disebut Tanjung Jati dan disusun pula perangkat adatnya. Nama Tanjuang Jati karena disana terdapat beberapa kayu jati yang sangat besar. Karena telah berkembang pula penduduk di Talago, Ompang Godang dan Tanjuang Jati, maka dikembangkan lagi kearah utara dan disusun perangkat adatnya dan bermusyawarah membuat nama koto, karena koto yang paling kecil diwaktu itu mak diberilah nama nama Koto Kociak.

Dt.Karaing semasa itu mulai mengarah ke Padang Kandi bersama Dt. Paduko Tuan, disana bersama anak kemenakan sudah berkembang disana maka disusun pula perangkat adat dan bermusyawarah untuk menentukan nama koto, karena dizaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dahulu banyak terdapat tanaman Asam Kandi didekat lereng *bukik* maka diberilah nama Padang Kandi.

Setelah berkembang penduduk di Koto Kociak, maka kaum dari Koto Kociak dan Ompang Godang *Manaruko* kearah Sipingai dan setelah berkembang disana maka dibentuklah perangkat adatnya. Diberi nama Sipingai karena ada suatu cerita yang mungkin tidak bisa diterima dengan logika, yaitu pada zaman dulunya ada dua sekawan yang berladang kearah bukit di sipingai tersebut, setiap pagi dua sekawan ini selalu berangkat pagi dan membawa tempat nasi untuk makan tengah hari . pada suatu hari mereka mendapatkan sebutir telur di tepi sungai. Kemudian mereka bekerja diladang.

Namun ada hal yang sangat mengherankan dua sekawan tersebut dan mulai bertanya-tanya siap yang memasak air di dangau mereka. Saat mereka sibuk mencari siapakah yang memasak air tersebut, mereka menjadi merasa lapar dan membuka tempat nasi ternyata telur yang mereka temukan sudah tidak ada dan yang tersisa hanya pecahan telur saja dan mereka kembali mencari siapa yang memakan telur mereka. Kemudian mereka bertemu dengan seorang anak gadis cantik, mereka kemudian menanyakan dari mana anak gadis itu berasal. Anak gadis itu menjawab bahwa ia berasal dari dalam telur. Setelah bermufakat mereka memanggil anak gadis tersebut dengan Siupiak Pingai. Itulah asal usul nama nagari Sipingai yang dipercaya oleh masyarakat setempat.

Setelah berkembang penduduk di talago, Ompang Godang dan Koto Kociak, maka datanglah yang tiga koto ini kearah Padang Joopang sekarang dan membentuk perangkat adat. Padang Joopang berasal dari kenyataan alam yang ada pada dahulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kata. Ada pula yang menyebut Padang Bacupang dengan dibuktikan adanya banyak *piso*ko Urang Talago, Ompang Godang, dan Koto Kociak. Disitu petani yang mengolah tanah banyak menjumpai akar Opang, dan petani yang ada disitu setiap ada yang mau dikur selalu menggunakan akar Opang tersebut dengan menyebut *Joopang* (dengan opang). Sejak itu di namakan lah koto tersebut dengan Padang jopang.

4.2. Keadaan Geografis

Nagari Tujuh Koto Talago termasuk bagian dari Kecamatan Guguak yang berjarak sekitar 18 km di utara Kota Payakumbuh dan 26 km dari ibu kota Kabupaten Lima puluh Kota (Sarilamak). Nagari Tujuh Koto Talago kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat memiliki 7 (tujuh) Jorong (7 eks desa Lama) dengan Luas area 21.000 hektar.

Lahan di nagari Tujuh Koto Talago pada umumnya terdiri dari 279 hektar areal persawahan, 150 hektar areal perkebunan, 765 hektar tanah kering dan 185 hektar areal kolam/tambah dan sisanya tanag perbukitan sebahagian sudah diolah dan sebagian lagi masih ada yang belum dimanfaatkan. Posisi nagari Tujuh Koto Talago berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Nagari Jopang Manganti, Talang Maur Kecamatan Mungka
- Sebelah Selatan : Nagari Kubang Kecamatan Guguak
- Sebelah Barat : Nagari Limbanang Kecamatan Suliki
- Sebelah Timur : Nagari guguk VIII Koto

Gambar 4.1

Peta Nagari VII Koto Talago



4.3. Jumlah Penduduk

jumlah penduduk Nagari VIII Koto Talago pada januari 2019 dapat terlihat

pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jorong	Jumlah Penduduk		Jumlah	Persentase
		Lk	Pr		
1.	Talago	664	733	1.397	13.93%
2.	Tanjung Jati	998	1.016	2.014	20.08%
3.	Ampang Godang	637	627	1.264	12.60%
4.	Padang Jopang	711	735	1.446	14.41%
5.	Koto Kociak	841	912	1.753	17.47%
6.	Padang Kandi	485	561	1.046	10.43%
7.	Sipingai	540	572	1.112	11.08%
Jumlah		4.876	5.156	10.032	100%
%		48.60%	51.40%	100%	

Sumber : Kantor Walinagari VII Koto Talago

4.3.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Nagari VII Koto Talago pada tahun 2013 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak pernah sekolah	12	0,10%
2.	Belum sekolah	523	4,56%
3.	Sedang sekolah	2.500	21,80%
4.	Tamat SD/Sederajat	2.633	22,96%
5.	Tamat SLTP/Sederajat	1.711	14,92%
6.	Tamat SLTA/Sederajat	2.850	24,86%
7.	Diploma 1	108	0,94%
8.	Diploma 2	130	1,13%
9.	Diploma 3	604	5,27%
10.	S 1	352	3,07%
11.	S 2	43	0,38 %
Jumlah		11.466	100%

Sumber: Kantor Wali Nagari VII Koto Talago

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penduduk yang tidak pernah sekolah berjumlah 12 orang (0,10%), penduduk yang belum sekolah berjumlah 523 orang (4,56%), penduduk yang sedang sekolah berjumlah 2.500 orang (21,80%), penduduk yang tamat SD/ sederajat berjumlah 2.633 orang (22,96%), penduduk yang tamat SLTP/ sederajat berjumlah 1.711 orang (14,92%), penduduk yang tamat SLTA/ Sederajat berjumlah 2.850 orang (24,86%), penduduk yang tamat Diploma 1 berjumlah 108 orang (0,94%), penduduk yang tamat Diploma 2 berjumlah 130 orang (1,13%), penduduk yang tamat Diploma 3 berjumlah 604 orang (5,27%), penduduk yang tamat S1 berjumlah 352 orang (3,07%), dan penduduk yang S2 berjumlah 43 orang (0,38%)

4.3.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian

Tabel 4.3
Jumlah Pendudukan Berdasarkan Mata Pencapaian

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani	991	41,83%
2.	Buruh Tani	82	3,46%
3.	Karyawan Swasta	326	13,76%
4.	Pegawai Negeri Sipil	596	25,16%
5.	Pengrajin	9	0,38%
6.	Pedagang	112	4,73%
7.	Peternak	19	0,80%
8.	Montir	141	5,95%
9.	Dokter	12	0,51%
10.	Sopir	81	3,42%
Jumlah		2369	100%

Sumber: Kantor Wali Nagari VII Koto Talago

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa masyarakat Nagari VII Koto Talago memiliki Mata Pencapaian yang bermacam-macam diantaranya Petani berjumlah 991 orang (41,83%), penduduk yang bekerja sebagai Buruh Tani berjumlah 82 orang (3,461%), penduduk yang bekerja sebagai Karyawan Swasta berjumlah 326 orang (13,76%), penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berjumlah 596 orang (25,16%), penduduk yang bekerja sebagai Pengrajin berjumlah 9 orang (0,38%), penduduk yang bekerja sebagai Pedagang berjumlah 112 orang (4,73%), penduduk yang bekerja sebagai Peternak Berjumlah 19 orang (0,80%), penduduk yang bekerja sebagai Montir berjumlah 141 orang (5,95%). Penduduk yang bekerja sebagai Dokter berjumlah 12 orang (0,51%), dan penduduk yang bekerja sebagai Sopir berjumlah 81 orang (3,42%)

4.3.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Jumlah	(%)
1.	Islam	11.466	100%
2.	Kristen	0	0%
3.	Lainnya	0	0%
	Jumlah	11.466	100%

Sumber: Kantor Walinagari VII Koto Talago

Berdasarkan tabel diatas kita lihat bahwa penduduk Nagari VII Koto Talago yang beragama islam seluruhnya menganut agama islam.

4.4. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

1.4.1. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari, yakni lembaga yang beranggotakan *Tungku Tigo Sajaringan*. *Tungku Tigo Sajaringan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum Intelektual) dan *Niniak Mamak* (Pemimpin Suku-Suku dalam nagari). keputusan penting yang akan diambil selalu dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajaringan* dibalai adat atau balairung sari nagari.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga perwakilan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi, yang keanggotaannya sesuai dengan adat salingka nagari. Berikut adalah susunan pengurus Kerapatan Adat Nagari Tujuh Koto Talago:

Tabel 4.5
Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Tujuh Koto Talago Periode 2013-2016

No	Jabatan	Nama
1.	Pelindung	Wali Nagari Tujuh Koto Talago
2.	Penasehat	Dt. Bandaro Hitam Dt. Pucuak se Tujuh Koto Talago
3.	Ketua	A. Dt. Rajo Mangkuto
4.	Wakil Ketua	A. Dt. Panduko Tuan
5.	Sekretaris	A. Bandaro Gomuak
6.	Bendahara	U. Dt. Patiah
7.	Wakil Bendahara	Z. Dt. Patiah
8.	Urusan Organisasi	
	Ketua	Y. Dt. Patiah
	Anggota	A. Dt. Rajo Mallengang H Ak. Dt. Majo Indo
9.	Urusan Pemberdayaan Tanah Ulayat/Aset Nagari	
	Ketua	I. Dt. Diko
	Anggota	A. Dt. Damuanso I. Dt. Malikak
10.	Urusan Penyelesaian Sengketa Soko dan Pisoko serta pengalaman ASBK	
	Ketua	HE Dt. Parpatiah
	Anggota	I. Bosea Nan Panjang M. Dt. Pangka Sinaro
11.	Urusan Organisasi Seni dan Permainan Anak Nagari	
	Ketua	Y. Dt. Patiah
	Anggota	M. Dt. Bosa Nan Bakoruk D. Dt. Rajo Imbang

Sumber: Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.4.2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintahan Nagari dalam menampung dan mewujudkan Aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Adapun susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tujuh Koto Talago:

Tabel 4.6
Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Tujuh Koto Talago Periode 2013-2018

No	Nama	Jabatan	Utusan/Alamat
	Efianto Dt. Tumbi Mardison Nasution Asri	Ketua Sekretaris Bendahara	Talago Tanjung Jati Ampang Godang
	Seksi Pembinaan Agama, Adat dan Pendidikan		
	Alismani Afdal Dt. Panduko Tuan Mulyadi S. Ag Sawalizar Yohasman	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Koto kociak Koto Kociak Ampang Godang Sipingai Ampang Godang
3.	Seksi Pembinaan K3 dan Lingkungan Hidup		
	Aziz Rusihan Hendri Ceng Dedi Eka Putra Masri Yulis Mesra	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Talago Ampang Godang Koto Kociak Talago Sipingai
4.	Seksi Pembinaan Perekonomian dan Koperasi		
	Nurmasdi Hartati Indana Sofia Reni Sofia Rahmi Elfa	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Tanjung Jati Padang Jopang Koto Kociak Talago Padang Jopang
	Seksi Pembinaan Kependudukan dan Kesehatan		
	Hamidah Zufni Hafni Ardes Marfita Ernawati Ismawelfi Ramadania	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Tanjung Jati Padang Jopang Padang Jopang Padang Kandi Sipingai Talago
	Seksi pembinaan Sosial dan Kesejahteraan Keluarga		
	Wasni Dt. Sotiah Cekrawati H. Muhammad Nasir Betro Yudisman Khaidar Afni	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	Padang Kandi Padang Jopang Ampang Godang Sipingai Talago
	Seksi Pembinaan Pemuda Olahraga dan Kesenian		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta

UIN

Suska Riau

State

Islamic University

Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asril Haitar	Ketua	Tanjung Jati
Irsal Haitar	Anggota	Tanjung Jati
Afdal	Anggota	Padang Jopang
Tomi Febrian	Anggota	Tanjung Jati
Masrialdi	Anggota	Padang Kandi

Sumber: Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.4.3. Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari)

Bamus Nagari merupakan suatu badan yang dianggap sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan nagari karena ikut menyetujui Anggaran Belanja Nagari serta ikut membahas segala perancangan peraturan nagari bersama walinagari. Selain itu bamus merupakan lembaga yang berfungsi sebagai perencanaan pembangunan nagari, disamping itu juga penyalur aspirasi warga nagari kepada walinagari, sehingga aspirasi masyarakat itu dapat menjadi pedoman dalam pembangunan nagari.

Berikut adalah susunan pengurus badan Permusyawaratan Nagari Tujuh Koto Talago:

Tabel 4.7
Susunan Kelembagaan Bamus Nagari
Tujuh Koto Talago

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	Drs. H. Maizul Basyar
2.	Wakil Ketua	Drs. Akmal
3.	Sekretaris	Zamrefrida, S.Pd
4.	Anggota	Retni Yenti, S. Pd
5.	Anggota	Asril Haithar
6.	Anggota	Musnal Dt. Majo Bosea
7.	Anggota	Novariza
8.	Anggota	Drs.Sofwan R Bendang
9.	Anggota	Syamsi

Sumber: kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.4.4. Bundo Kandung

Bundo Kandung adalah salah satu seksi atau salah satu unit lembaga dalam lembaga kerapatan adat di Minang kabau yang mungki terdapat pada semua tingkatan lembaga kerapatan adat itu mulai dari tingkat nagari sampai ke tingkat Alam Minangkabau. Adanya bundo kanduang dalam suatu kaum karena kaum memerlukan seorang pemimpin perempuan yang dapat memimpin seluruh perempuan beserta anak cucu yang ada dalam kaum.

Bundo Kandung bukanlah jabatan formal yang dipilih dan diangkat berdasarkan pemilihan atau pengangkatan resmi. Bundo Kandung merupakan figure seorang pemimpin yang tampil spontan di antara perempuan-perempuan yang ada. Penampilannya adalah berkat kemampuan dan kharismanya yang tumbuh dari dirinya sendiri yang didukung oleh kemampuan memimpin serta ilmu pengetahuan yang memadai, dengan dilengkapi kejujuran dan perilaku yang baik, penampilannya diakui dan diterima oleh semua pihak terutama oleh para perempuan dan niniak mamak dalam kaum.

Adapun susunan pengurusan Bundo Kandung Nagari Tujuh Koto Talago adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Susunan Pengurus Bundo Kandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nagari Tujuh Koto Talago

No	Jabatan	Nama
1.	Penasehat	Ny. Azizah Yon Hendri.SS
2.	Ketua	Hj. Amdalisma
3.	Sekretaris	Amelia
4.	Wakil Sekretaris	Yurni Akmal
5.	Bidang Organisasi	
	Ketua	Yan Elfi
	Anggota	Rosdiana
6.	bidang Pendidikan/Kebudayaan	
	Ketua	Elda
	Anggota	Hj. Maidainis
7.	Bidang Kesejahteraan	
	Ketua	Khaidarnis
	Anggota	Erlinda

Sumber: Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.4.5. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga merupakan suatu bentuk dari pendidikan non formal yakni pendidikan luar sekolah yang penggerakannya yaitu pemerintahan dan berkerjasama dengan setiap masyarakat guna untuk dapat membangun kehidupan yang baik lagi. Organisasi PKK ini memiliki peran untuk dapat mengembangkan dan memberdayakan kaum perempuannya. Melalui program ini kaum perempuan dapat melatih dirinya untuk lebih aktif. PKK bertujuan untuk memberdayakan setiap keluarga agar bisa lebih meningkatkan kesejahteraan hidupnya baik lahir maupun batin guna menciptakan keluarga yang beriman, berakhlak mulia dan berbudi luhur, maju mandiri, sejahtera, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Berikut adalah susunan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Nagari Tujuh Koto Talago:

Tabel 4.9
Susunan Kepengurusan PKK
Nagari Tujuh Koto Talago

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Wakil Ketua 1 Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Bendahara Sekretaris	Ny. Azizah Yon Hendri. SS Mimi Yuliati. BA Elida, S. Ag Zamrefrida, S.Pd Eliza Darwis, S.P Hartati Dahliati
2.	POKJA I	
	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Hj.Nurkhasti Dra. Yulfia Gemswita Safrida
3.	POKJA II	
	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Yusmaida, S.Pd Yulfa Eriati Nofrini Hj. Elmiati
4.	POKJA III	
	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ernita Basyir, BA Samsidar Tjekrawati Idelwati
5.	POKJA IV	
	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Hamida Zukni Rena Ningsih Krisna Nelli Hafni

Sumber: Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.4.6. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan tempat diselenggarakannya berbagai upaya atau kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya generasi muda dalam rangka pengembangan Sumber daya Manusia. Dalam masyarakat nagari Tujuh Koto Talago sendiri, Karang Taruna ada pada setiap jorongnya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Susunan Pengurus Karang Taruna
Nagari Tujuh Koto Talago

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua Umum	Putra Satria Very
2.	Jorong Talago	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Harry Putra Adil Hendri Eka Putra
3.	Jorong Ampang Godang	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Dr. Syaiful Wiwi Anthony Widya
4.	Jorong Tanjung Jati	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Irsal Haitar Sri Mayanti Elizabetnawati
5.	Jorong Koto Kociak	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Genova Satria Seona Imelda Dudi Hermansyah
6.	Jorong Padang Jopang	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Aswendi Dt. Manso Yelnita Hj. Ardes Marfita
7.	Jorong Padang Kandi	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	Usmardi Sri Kemala Dewi Firda Maledi Malesi
	Jorong Sipingai	
	Ketua Sekretrasi Bendahara	N Dt. Cangang Lisdarman Kasmadi

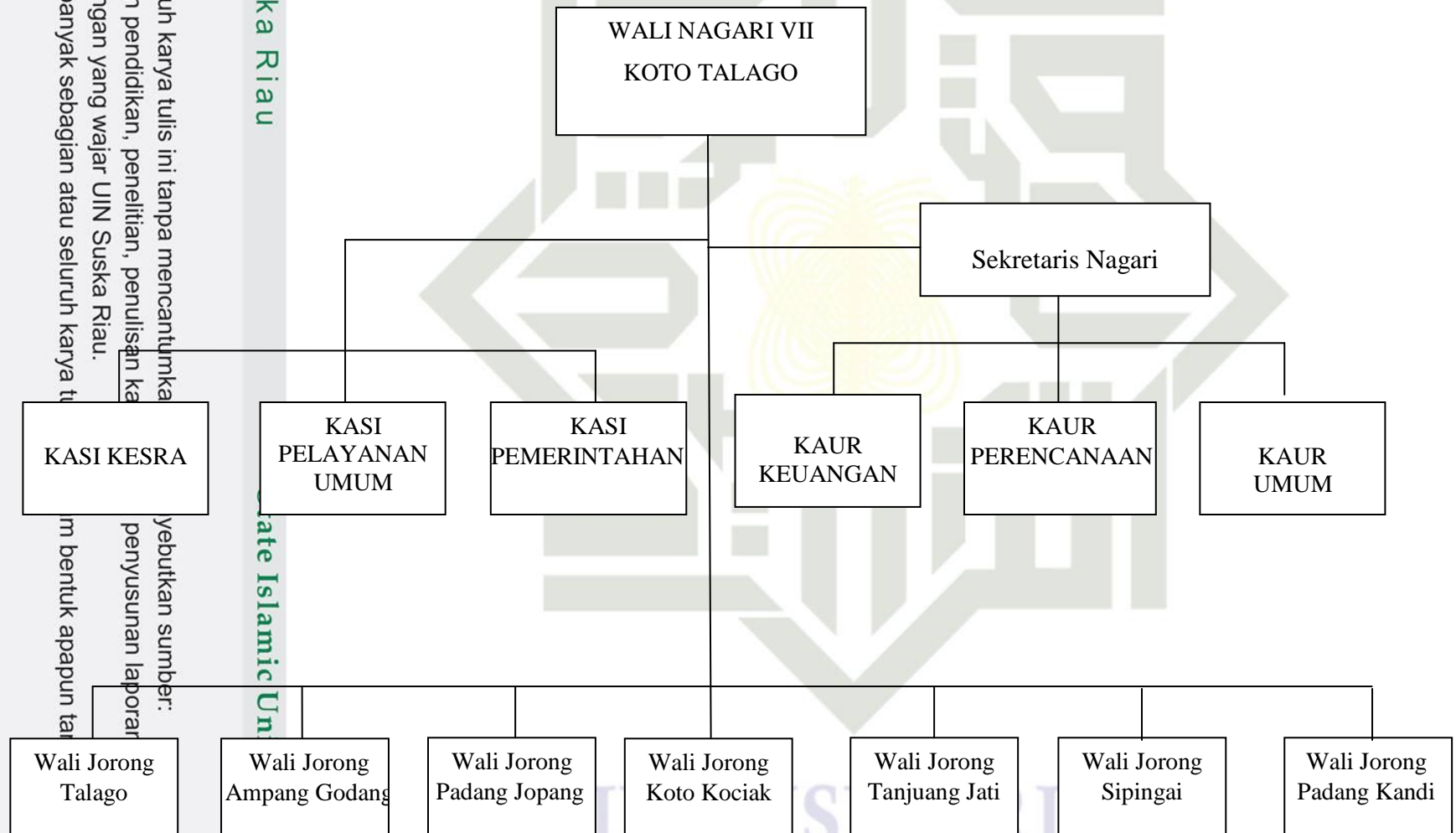
Sumber: Kantor Wali Nagari Tujuh Koto Talago

1.7. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Tujuh Koto Talago

Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun dan memberikan pelayanan berbagai kepentingan umum kepada masyarakat mulai dari masalah keamanan, kesehatan, kependudukan, serta ketertiban lainnya. Menurut Rasyid dalam Hamdi (2011: 34) pemerintahan memiliki fungsi diantaranya pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pengaturan.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari VII Koto Talago



BAB VI

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan pada BAB V mengenai Analisis Sistem Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota, maka penulis dapat menarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut.

Pemerintahan nagari menurut Perda Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari, nagari dipimpin oleh seorang walinagari yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat nagari, dalam menjalankan tugasnya, walinagari dibantu oleh seorang sekretaris nagari, kepala urusan dan serta walijorong yang memimpin tiap-tiap jorong.

Pelaksanaan sistem pemerintahan di tingkat nagari merupakan pemerintahan yang harus didasarkan pada adat istiadat yang berlandaskan pada Syariat Islam dengan filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Nagari sebagai kesatuan adat memiliki kebebasan untuk mengurus nagarinya sendiri sesuai adat yang berlaku. Dalam masyarakat adat minangkabau penghulu merupakan sebutan kepada niniak mamak pemangku adat yang bergelar datuk yang merupakan pemimpin dalam pemerintahan yang didasarkan pada adat. Namun pada saat ini peran niniak mamak selaku perangkat adat yang memahami seluk beluk adat sudah tidak dirasakan lagi

oleh masyarakat. Adat tersebut dikuasai dan dipahami oleh semua aparatur pemerintahan nagari yang wawasan yang terbatas.

Sistem pemerintahan nagari di Nagari VII Koto Talago yang dilihat dari pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian dari aparatur nagari serta lembaga-lembaga nagari yang ada secara umum telah berjalan sesuai dengan perannya masing-masing. Hal ini terlihat dari telah terlaksananya program-program pembangunan yang ada di nagari VII Koto Talago berdasarkan keinginan untuk lebih maju dari nagari itu sendiri.

Selain itu sudah adanya sarana dan prasana, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan serta sarana transportasi yang memadai sehingga masyarakat merasa nyaman dan mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut sangat meningkatkan kualitas pemerintahan nagari yang telah berjalan.

Pemerintahan nagari juga bekerja sama dengan Bamus Nagari yang merupakan suatu badan yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat nagari untuk kemudian disalurkan bersama walinagari beserta perangkatnya untuk dijadikan pedoman untuk pembangunan nagari.

Berdasarkan wawancara bersama narasumber menyebutkan bahwa Bamus Nagari ini diangkat berdasarkan unsur niniak mamak, unsur alim ulama, unsur bundo kanduang, unsur cadiak pandai dan unsur pemuda yang diusulkan oleh tiap jorong-jorong. Hal ini disebabkan karena seorang Bamus Nagari ini dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sosial adat budaya dan mengetahui seluk beluk adat istiadat masyarakatnya sendiri.

Peran Bamus Nagari masih dipertanyakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari VII Koto Talago, hal ini terlihat dari kinerja Bamus Nagari yang belum berjalan sepenuhnya, tidak adanya koordinasi yang baik antara Bamus Nagari dan Walinagari dalam menyelenggarakan pemerintahan. Hal ini terlihat dari adanya musyawarah yang diadakan Bamus Nagari bersama walinagari yang menyebutkan beberapa aspirasi dari masyarakat, seharusnya Bamus Nagari yang menyampaikan apa saja aspirasi yang datang dari masyarakat, namun hal tersebut diungkapkan oleh pemerintah nagari.

Kurangnya peran Bamus Nagari ini tidak terlepas dari kurangnya interaksi yang dilakukan bamus kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa enggan untuk menyampaikan aspirasi kepada Bamus Nagari dan lebih memilih menyampaikannya kepada aparat pemerintah nagari yang dirasa terbuka untuk menerima masukan dari masyarakatnya.

6.2. Saran

Adapun saran dan masukan yang dapat penulis berikan adalah:

1. Lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam pemerintahan nagari VII Koto Talago mengingat pemerintahan Nagari VII Koto Talago telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik.
2. Kepada masyarakat Nagari VII Koto Talago diharapkan bisa selalu memberikan dukungan terhadap pemerintahan nagari, karena tanpa dukungan dari masyarakat nagari pemerintahan nagari yang sudah baik bisa menjadi buruk

3. Melakukan pengecekan terhadap sarana dan prasarana yang telah tidak layak dipakai dan melengkapi sarana dan prasarana yang dirasa belum memadai agar bisa mensejahterakan masyarakat.
4. Menyediakan tempat sampah umum yang disetiap jorong agar masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan lagi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Andora, Hengki. 2011. Desa Sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2
- Anwar, Chairul. 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minang Kabau*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arif, Fitra. 2017. *Teori Sistem Pemerintahan: Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Asuti, Nuraini Budi, Lala M. Kolopaking, dan Nurmala K. Pandjaitan. 2009. Dilema dalam Transformasi Desa ke Nagari: Studi Kasus di Kenagarian IV Koto palembayan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. Volume 03 Nomor 02.
- Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hakimy, Idrus. 1997. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minang Kabau*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamdi, Muchlis. 2010. *Memahami Ilmu pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kemal, Iskandar. 2009. *Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya Tinjauan tentang Kerapatan Adat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lilisa, Robert. Juli 2015. Study komparatif Nagari dengan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 22 nomor 2
- Mayarni dan Mimin Sundari Nasution. 2016. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Nohara, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari.
- Purba, Mulyadi. 2013. *Entrepreneur Muslim dan Etika Wirausaha Adat Minang Kabau*. Bandung: Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahayu, Ani Sri. 2018. *Pengantar Pemerintah Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta

Sugiyono. 2015. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta

Syaifii, Inu Kencana. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Widjaja, Haw. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Data Daftar Kecamatan dan Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Daftar Nama Nagari
1.	Akabiluru	7	1. Koto Tangan 2. Batu Hampar 3. Sariak Laweh 4. Sungai Balantiak 5. Suayan 6. Pauah Sangik 7. Durian Gadang
2.	Bukik Barisan	5	1. Banja Loweh 2. Baruah Gunuang 3. Koto tangah 4. Maek 5. Sungai Naniang
3.	Guguak	5	1. Sungai Talang 2. Guguak VIII Koto 3. Kubang 4. Simpang Sugiran 5. VII Koto Talago
4.	Gunuang Omeh	3	1. Koto Tinggi 2. Talang Anau 3. Pandam Gadang
5.	Harau	11	1. Tarantang 2. Sarilamak 3. Solok Bio Bio 4. Harau 5. Gurun 6. Lubuak Batingkok 7. Koto Tuo 8. Batu Balang 9. Bukik Limbuku 10. Taram 11. Pilubang
6.	Kapur IX	7	1. Koto Lamo 2. Lubuak alai 3. Muari Paiti 4. Koto bangun 5. Durian Tinggi 6. Sialang 7. Galugua
7.	Lareh Sago Halaban	8	1. Ampalu 2. Halaban 3. Sitanang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Dilarang mengutip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		4. Tanjuang Gadang 5. Labuah Gunuang 6. Balai Panjang 7. Bukik Sikumpa 8. Batu Payuang
8. Luak	4	1. Mungo 2. Andaleh 3. Sungai Kamuyang 4. Tj. Aro Sikabu-kabu
9. Mungka	4	1. Mungka 2. Jopang Manganti 3. Talang Maua 4. Simpang Kapuak
10. Pangkalan Koto Baru	6	1. Koto Alam 2. Manggilang 3. Pangkalan 4. Gunuang Malintang 5. Tanjuang balik 6. Tanjuang pauah
11. Payakumbuh	7	1. Taeh Bukik 2. Taeh Baruah 3. Koto Tangah Simalanggang 4. Koto Baru Simalanggang 5. Simalanggang 6. Piobang 7. Sungai Beringin
12. Situjuah Limo Nagari	5	1. Situjuah Gadang 2. Situjuah Banda Dalam 3. Situjuah Ladang Laweh 4. Situjuah batua 5. Tungka
13. Suliki	5	1. Suliki 2. Kurai 3. Sungai Rimbang 4. Limbanang 5. Tanjuang Bungo

DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Bapak Yon
Hendri Wali Nagari VII Koto Talago



Wawancara bersama Bapak Betro
Yudisman Wali Jorong Sipingai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Yarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Afrizal
Wali Jorong Ampang Godang



Wawancara Bersama Bapak Djumadil
Rahman Wali Jorong Talago

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Irfan
Wali Jorong Tanjung Jati



Wawancara Bersama Bapak Andri
Wali Jorong Koto Kociak

USKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak M.
Ridha Wali Jorong Padang Kandi



Wawancara Bersama Bapak Maizul
Basyar Ketua Bamus Nagari VII
Koto Talago

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Bapak Efianto
N. Dt. Tumbi Tokoh Adat Nagari
VII Koto Talago



Wawancara Bersama Bapak
Warsyamsul Wali Jorong Padang
Japang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Wali Nagari VII Koto Talago



Kantor Wali Jorong Padang Kandi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Wali Jorong Sipingai



Kantor Wali Jorong Ampang Gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Wali Jorong Talago



Kantor Wali Jorong Tanjung jati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kantor Wali Jorong Koto Kociak



Kantor Wali Jorong Padang Jepang
Yang sedang direnovasi

KUESIONER PENELITIAN

*Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 kota
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari*

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan sistem pemerintahan nagari melalui peraturan daerah kabupaten 50 kota nomor 2 tahun 2013 tentang pemerintahan nagari di kenagarian VII Koto Talago. Oleh karena itu di sela-sela kesibukan Bapak/ibu, kami mohon dengan hormat kesedian Bapak/Ibu untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesedian dan partisipasi Bapak/ibu sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :

Isilah kuesioner ini dengan memberikan tanda ☒ pada salah satu jawaban yang anda pilih di kolom yang telah tersedia.

3 Keterangan:

3SS : Sangat Setuju
 2S : Setuju
 3KS : Kurang Setuju
 2TS : Tidak Setuju
 3STS : Sangat Tidak Setuju

A. Pemerintah Nagari

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Pemerintah Nagari VII Koto Talago telah bisa mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai budaya masyarakat Nagari VII Koto Talago.	7	3	0	0	0
2	Pemerintah Nagari VII Koto Talago sudah melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang diimpahkan Kabupaten.	7	3	0	0	0
3	Pemerintah Nagari VII Koto Talago sangat baik dalam melakukan wewenang yang telah diberikan dan tidak pernah terjadi penyelewengan terhadap wewenang tersebut.	5	4	1	0	0
4	Hak yang ada pada Pemerintah Nagari VII Koto Talago untuk mengatur dan mengurus nagari tidaklah memberatkan masyarakat nagari	5	5	0	0	0
5	Pemerintah nagari VII Koto Talago bisa melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia.	8	2	0	0	0
6	Pemerintah nagari VII Koto Talago bisa meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.	3	7	0	0	0
7	Pemerintah nagari VII Koto Talago dapat mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat nagari.	5	5	0	0	0

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Badan Pemusyawaratan Nagari

No	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS
1	Bamus nagari VII Koto Talago dapat menyerap, menampung, megghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat nagari.	2	5	2	1	0
2	Bamus nagari VII Koto Talago dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan nagari	3	6	0	1	0
3	Bamus nagari VII Koto Talago telah menjalankan fungsinya dengan baik.	2	5	3	0	0
4	Jumlah anggota bamus nagari VII Koto Talago telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku	7	3	0	0	0
5	Bamus nagari VII Koto Talago dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar.	2	6	1	1	0
6	Hak yang di peroleh bamus nagari VII Koto Talago dalam penyelenggraan pemerintahan nagari tidak pernah diselewengkan.	6	4	0	0	0
7	Anggota bamus nagari VII Koto Talago sangat menjunjung	6	4	0	0	0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	tinggi nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat nagari								
	Anggota bamus nagari VII Koto Talago tidak ada yang melakukan rangkap jabatan	7	2	1	0	0			
	Anggota bamus nagari VII Koto Talago tidak ada yang menjadi pelaksana proyek nagari	7	2	1	0	0			
	Anggota bamus nagari VII Koto Talago tidak ada yang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan tindakan diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat.	5	4	1	0	0			
11	Anggota bamus nagari VII Koto Talago tidak ada melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme)	6	4	0	0	0			
12	Anggota bamus nagari VII Koto Talago tidak ada yang melakukan penyalahgunaan wewenang	6	4	0	0	0			

Pedoman Wawancara

a. Pemerintah nagari

1. Bagaimanakah sistem pemerintahan nagari dalam arti sebenarnya?
2. Bagaimana kedudukan nagari dalam sistem pemerintahan nagari?
3. Apakah ada perbedaan kedudukan antara wali nagari dan masyarakat?
4. Bagaimanakah peranan Wali Nagari dalam mewujudkan sistem pemerintahan nagari?
5. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pemerintahan nagari sekarang?
6. Apa saja keluhan masyarakat kepada pemerintahan nagari yang sekarang?
7. Apakah perangkat nagari mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan nagari?
8. Dalam pasal 22 ayat 6 Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota tentang pemerintahan nagari dijelaskan bahwa pelaksana teknis diangkat berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan nagari. Bagaimanakah cara pengangkatan pelaksana teknis?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nagari?

b. Badan Musyawarah Nagari

1. Bagaimanakah kedudukan Bamus Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari?
2. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban seorang bamus nagari?
3. Bagaimanakah cara pengangkatan anggota bamus nagari?
4. Sebagaimana yang diketahui bahwa seorang yang menjabat menjadi bamus nagari tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Apa sanksi yang diberikan jika seorang bamus nagari memiliki rangkap jabatan?
5. Apakah masyarakat selalu terlibat dalam musyawarah?
6. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bamus Nagari dalam menjalankan kewenangannya sebagai penyelenggara pemerintahan nagari dan bagaimana cara mengatasinya?

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

MENIMBANG:

- a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi aspirasi masyarakat bersama Pemerintahan Nagari dan mengatasi munculnya permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari

MENGINGAT:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 nomor 10); dan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14).

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN
NAGARI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
7. Camat adalah Camat Se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
8. Nagari adalah Suatu kesatuan teritorial masyarakat hukum adat yang masyarakatnya mempunyai ikatan geneologis menurut garis keibuan (matrilineal) yang memiliki batas-batas fungsional adat.
9. Pemerintahan Nagari Adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Nagari adalah Walinagari dan Perangkat Nagari sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Wilayah Pemerintahan Nagari adalah kesatuan wilayah pemerintahan Nagari yang mempunyai batas-batas administrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari
13. Penjabat Wali Nagari adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Wali Nagari yang sifatnya sementara.
14. Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari yang dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.
15. Jorong adalah bagian dari wilayah pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang kepala jorong
16. Kepala jorong adalah perangkat pemerintah nagari yang membantu dan bertanggungjawab kepada walinagari dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di jorong yang bersangkutan.
17. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Lembaga Permusyawaratan dan permufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsure penyelenggara pemerintahan nagari.
18. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan nagari dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah nagari dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.
19. Limbago Adat adalah unsure pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku dimasing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari.
20. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah satuan organisasi niniak mamak yang dibentuk atas dasar Musyawarah mufakat, dan/atau dari turunan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga organisasi Niniak Mamak yang lebih tinggi.
21. Keuangan Pemerintahan Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pemerintahan nagari tersebut.
22. Harta Kekayaan Pemerintahan Nagari (Aset Pemerintahan Nagari) adalah barang milik pemerintahan nagari yang berasal dari kekayaan asli pemerintahan nagari, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja nagari atau hak lainnya yang sah dan harta kekayaan pemerintahan nagari yang telah dikuasai secara sah yang sudah hak adatnya.
23. Anggaran pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan setujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan peraturan nagari
24. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut dengan bUMNagari adalah suatu usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Nagari dan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Penataan Pemerintahan Nagari adalah Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan perubahan status serta penyesuaian pemerintahan nagari untuk mewujudkan pemerintahan nagari yang maju dan mandiri
26. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah pemberian status pemerintahan nagari
27. Penghapusan Pemerintahan Nagari adalah Pencabutan status sebagai pemerintahan nagari dan selanjutnya digabung dengan pemerintahan nagari lain yang bersandingan.
28. Penggabungan Pemerintahan Nagari adalah penyatuan dua pemerintahan nagari atau lebih menjadi pemerintahan nagari baru.
29. Perubahan status pemerintahan nagari adalah perubahan dari pemerintahan nagari menjadi kelurahan.
30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan pemerintahan nagari berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II PENATAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- a. Untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan nagari dilakukan penataan pemerintahan nagari
- b. Penataan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud apa ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
 - c. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, dan
 - d. Meningkatkan daya saing nagari
- c. Penataan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Pembentukan pemerintahan nagari
 - b. Penghapusan pemerintahan nagari
 - c. Penggabungan pemerintahan nagari
 - d. Perubahan status pemerintahan nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Kedua Pembentukan Pemerintahan Nagari

Pasal 3

1. Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan pemerintahan nagari baru diluar pemerintahan nagari yang ada
2. Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pemekaran dari 1 (satu) pemerintahan dari menjadi 2 (dua) pemerintahan nagari atau lebih
 - b. Penggabungan dari bagian wilayah pemerintahan nagari dari pemerintahan nagari yang bersanding menjadi 1 (satu) pemerintahan nagari, atau
 - c. Penggabungan beberapa pemerintahan nagari menjadi 1 (satu) pemerintahan nagari baru
3. Pembentukan pemerintahan nagari ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan mempertimbangkan praksarsa masyarakat, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, kemampuan dan potensi nagari.
4. Pembentukan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Batas usia minimal nagari 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 kepala keluarga
 - c. Luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan
 - d. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar wilayah dalam nagari
 - e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat setempat
 - f. Memiliki potensi nagari
 - g. Batas pemerintahan nagari yang dinyatakan dalam bentuk pata batas pemerintahan nagari yang disepakati oleh pemerintahan nagari yang berbatasan
 - h. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan public, dan
 - i. Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan nagari
5. Pembentukan pemerintahan nagari dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Tokoh masyarakat pada bagian pemerintahan nagari yang ingin ditingkatkan menjadi pemerintahan nagari melakukan musyawarah yang difasilitasi oleh kepala jorong untuk mendapatkan kesepakatan
 - b. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada walinagari untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bamus Nagari, Limbago Adat Nagari dan kepala jorong lainnya bersama tokoh masyarakat di nagari tersebut

- c. Walinagari menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada bupati melalui camat berupa berita acara hasil kesepakatan dengan melampirkan notulen dan daftar hadir peserta musyawarah
- d. Berdasarkan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf c pemerintah nagari persiapan ditetapkan dengan keputusan bupati
- e. Pemerintahan nagari persiapan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibina oleh walinagari Induk dan setelah 3 (tiga) tahun dinilai oleh sebuah tim yang dibentuk oleh bupati untuk ditingkatkan statusnya menjadi pemerintahan nagari penuh
- f. Apabila setelah dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud huruf e ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka pemerintahan nagari persiapan tersebut bergabung kembali dengan pemerintahan nagari induk
- g. Tata cara pembentukan pemerintahan nagari persiapan diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati, dan
- h. Pengesahan pemerintahan nagari persiapan menjadi pemerintahan nagari definitif ditetapkan dengan peraturan daerah

Pasal 4

- (1). Dalam wilayah pemerintahan nagari dibentuk jorong yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan nagari dan ditetapkan dengan peraturan nagari
- (2). Penetapan wilayah jorong sebagaimana disebut ayat (1) dikukuhkan dengan keputusan Bupati
- (3). Pedoman dan Tata Cara Penataan Jorong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Penghapusan Pemerintahan Nagari

Pasal 5

- (1). Penghapusan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b merupakan tindakan pencabutan status pemerintahan nagari yang ada
- (2). Pemerintahan nagari yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dihapuskan dan digabung dengan pemerintahan nagari lainnya yang berdampingan

Bagian Keempat

Penggabungan Pemerintahan Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 6

Penggabungan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdampingan dalam satu kecamatan dapat digabung menjadi pemerintahan nagari baru berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan
- b. Dua pemerintahan nagari atau lebih yang berdampingan dapat bergabung menjadi pemerintahan nagari berdasarkan kesepakatan nagari yang bersangkutan

Bagian Kelima

Perubahan Status Pemerintahan Nagari

Pasal 7

- (1). Pemerintahan nagari dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Nagari bersama Bamus Nagari dengan Memperhatikan saran dan pendapat Masyarakat
- (2). Perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah memperhatikan persyaratan:
 - a. Luas wilayah tidak berubah
 - b. Jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 kepala keluarga
 - c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan
 - d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian
 - e. Kondisi sosial budaya masyarakat yang beranekaragam dan sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh per seratus) penduduknya mempunyai mata pencaharian non pertanian
 - f. Meningkatnya volume pelayanan masyarakat
 - g. Memiliki batas kelurahan yang dinyatakan dengan peta batas kelurahan, dan
 - h. Tersedianya dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten untuk pendanaan penyelenggaraan kelurahan
- (3). Walinagaru, Perangkat Nagari dan anggota Bamus Nagari dari pemerintahan nagari yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatan dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagari, perangkat nagari dan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan bupati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 8

- a. Seluruh barang milik pemerintahan nagari dan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan pemerintahan kabupaten
- b. Kekayaan pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola pemerintah kabupaten untuk kepentingan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- c. Pendanaan sebagai akibat perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

Pasal 9

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status pemerintahan nagari menjadi kelurahan berlaku terhitung sejak ditetapkan nomor registrasi dan pengaturan kode nagari oleh menteri yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAHAN NAGARI

Pasal 10

Pemerintahan Nagari mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat dan melaksanakan bagian-bagian dari suatu urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan kabupaten

Pasal 11

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan nagari mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul nagari
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan nagari
- c. Tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada pemerintahan nagari.

Pasal 12

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang diserahkan kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 13

Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada pemerintahan nagari dengan mempertimbangan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisien dan efektivitas.

Pasal 15

- a. Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun urusan pemerintahan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pasal 11 tidak berjalan secara efektif, pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kepada pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 16

- (1). Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan nagari sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
- (2). Pemerintah nagari berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta Sumber daya Manusia
- (3). Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu

Hak Pemerintahan Nagari

Pasal 17

- a. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan urusan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih pimpinan Pemerintahan Nagari
 - c. Mengelola aparatur Pemerintahan Nagari
 - d. Mengelola kekayaan dan aset pemerintahan nagari
 - e. Memungut iuran nagari
 - f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah, dan
 - h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- Bentuk-bentuk bagi hasil dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua **Kewajiban Pemerintahan Nagari**

Pasal 18

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan nagari, maka Pemerintahan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- f. Meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang nagari
- j. Mengembangkan sumber daya yang produktif di nagari
- k. Melestarikan lingkungan hidup
- l. Mengelola administrasi kependudukan
- m. Melestarikan nilai sosial adat dan syaria
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan
- o. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Hak dan kewajiban Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja Pemerintahan Nagari dan dijabarkan dalam bentuk penerimaan belanja dan pembiayaan pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nagari yang dikelola dalam sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari

Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Bagian Kesatu Asas

Pasal 20

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari wajib berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

- a. Asas Kepastian Hukum
- b. Asa Tertib Penyelenggaraan Negara
- c. Asas Kepentingan Umum
- d. Asas Keterbukaan
- e. Asas Proporsionalitas
- f. Asas Profesionalitas
- g. Asas Akuntabilitas
- h. Asas Efisiensi, dan
- i. Asas Efektivitas

Pasal 21

Penyelenggaraan Pemerintahan nagari adalah Pemerintahan Nagari dan badan Permusyawaratan Nagari

Bagian Kedua Pemerintahan Nagari Paragraf Nagari Struktur

Pasal 22

1. Pemerintahan Nagari terdiri dari Walinagari dan perangkat nagari
2. Perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya
3. Perangkat nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Secretariat nagari
 - b. Pelaksana teknis, dan
 - c. Perangkat kewilayahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Sekretaris Nagari dan Kepala Urusan.
5. Kepala urusan Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan
 - b. Kepala Urusan Pembangunan
 - c. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan, dan
 - d. Kepala Urusan lainnya berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
6. Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintahan nagari.
7. Perangkat Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah kepala Jorong.
8. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah nagari ditetapkan dengan peraturan nagari.

Paragraf

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 23

- (1). Walinagari mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari
 - b. Menetapkan peraturan nagari bersama dengan Bamus Nagari
 - c. Merencanakan pembangunan nagari
 - d. Menyusun rancangan APBNagari
 - e. Memfasilitasi kehidupan masyarakat Nagari
 - f. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan perekonomian nagari
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan nagari secara partisipatif
 - h. Mengembangkan teknologi tepat guna
 - i. Mewakili nagari didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) walinagari mempunyai kewajiban:
 - a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan nagari yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan nagari yang baik
- h. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan uang akuntabel dan transparan
- i. Mendamaikan perselisihan masyarakat
- j. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi nagari
- k. Mengembangkan sumber-sumber pendapatan pemerintahan nagari tanpa merugikan masyarakat
- l. Membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
- n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- o. Memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
- p. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undang

Paragraf 3

Larangan bagi Wali Nagari

Pasal 24

Wali Nagari dilarang:

- a. Menjadi pengurus partai politik
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Bamus Nagari, dan lembaga kemasyarakatan di Nagari yang bersangkutan
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- g. Menyalahgunakan wewenang, dan
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan

Paragraph 4

Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 25

Wali Nagari berhenti, karena:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. diberhentikan

Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari
- c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan
- d. Mencalonkan diri menjadi anggota legislative
- e. Tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari, dan
- f. Melanggar larangan bagi wali nagari

Pasal 26

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh bupati tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker, tindak pidana terhadap keamanan negara dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah-belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 27

Wali Nagari diberhentikan tanpa melalui usulan Bamus Nagari apabila terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 28

Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 , setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatan.

Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama Wali Nagari yang bersangkutan dan tidak mengaktifkan kembali

Pasal 29

Apabila wali nagari berhenti dari jabatan atas permintaan sendiri harus mendapatkan rekomendasi dari Bamus Nagari yang selanjutnya diteliti oleh Tim verifikasi dari Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

Sekretaris Nagari ditunjuk sebagai pelaksana tugas Wali Nagari pada saat Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 26

Pasal 31

- .Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dengan masa jabatan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2).Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dari Sekretaris Nagari atau Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat yang bersangkutan dengan tugas pokok melaksanakan pemilihan Wali Nagari disamping tugas-tugas umum pemerintahan nagari sehari-hari
- (3).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan penjabat Wali Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Tindakan penyidikan

Pasal 32

- (1).Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati atas permintaan pihak yang berwenang
- (2).Dalam hal persetujuan tertulis dari Bupati tidak terbit dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. Proses penyidikan dapat dilanjutkan
- (3).Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan
 - b. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, dan
 - c. Disangka melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara
- (4).Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesai penyidikan .

Paragraf 6

Perangkat Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 33

1. Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) bertugas membantu wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Nagari
3. Sekretaris nagari merupakan bagian dari Perangkat nagari, diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas nama Bupati
4. Sekretaris nagari sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
5. Perangkat nagari lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Nagari diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari setelah mendapat rekomendasi dari Camat
6. Batas usia pengangkatan perangkat nagari lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 7

Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 34

Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 35

1. Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan setiap bulan dan atai tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari
2. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnnya yang diterima wali nagari dan perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam ABPNagari
3. Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 36

1. Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi wali nagari atau perangkat nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau perangkat nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai pegawai Negeri
2. Gaji dan penghasilan lainnya yan berhak diterima oleh pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibayarkan instansi induknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pegawai negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau perangkat nagari berhak mendapatkan kenaikan pangkat dan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pegawai negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau perangkat nagari dikembalikan kepada instansi induknya.

Pasal 37

Biaya pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari dan perangkat nagari serta keluarga yang tidak pegawai dapat diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

1. Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari mengalami musibah di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagaimana pejabat pemerintahan nagari sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan penghasilan tiga bulan sekaligus
2. Apabila Wali Nagari dan Perangkat Nagari meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat pemerintahan nagari, maka kepadanya diberikan penghasilan empat bulan berikutnya sekaligus kepada ahli waris yang berhak

Pasal 39

Penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan sebagaimana dimaksud pasal 34 dapat diberikan kepada perangkat nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 40

1. Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dibebankan kepada APBNagari.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan keuangan Wali Nagari dan Perangkat nagari diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Nagari

Paragraf1 Kedudukan dan Fungsi

Pasal 41

Damus nagari berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 42

Bamus Nagari Memiliki fungsi:

- a. Menetapkan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari

Paragraf 2

Penetapan Anggota Bamus Nagari

Pasal 43

- (1). Anggota Bamus Nagari adalah keterwakilan dari penduduk nagari bersangkutan berdasarkan keterwakilan jorong yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2). Anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dari unsure niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang serta pemuda
- (3). Jumlah anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan jumlah gasal, sekurang-sekurangnya 7 (tujuh) orang, dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang ditentukan berdasarkan jumlah jorong dipemerintahan nagari yg bersangkutan dengan ketentuan:
 - a. Jumlah jorong 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), maka anggota Bamus Nagari adalah 7 (tujuh) orang
 - b. Jumlah jorong 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan), maka anggota Bamus Nagari adalah 9 (sembilan) orang
 - c. Jumlah jorong 10 (sepuluh) atau lebih, maka anggota Bamus Nagari adalah 11 (sebelas) orang, dan
 - d. Khusus bagi Nagari yang jumlah jorong lebih dari 11 (sebelas), penetapan anggota Bamus Nagari dilakukan dengan penetapan zona keterwilayahan. Zona keterwilayahan dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk dan jarak antar jorong.
- (4). Jumlah anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong sama, dan kekurangannya ditetapkan oleh wali nagari berdasarkan musyawarah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan luas wilayah.
- (5). Peresmian anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (6). Anggota Bamus Nagari sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7). Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Bamus Nagari adalah sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Bamus nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa”.

- (8). Masa keanggotaan Bamus Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal peresmian dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa keanggotaan
- (9). Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan proses penetapan anggota Bamus Nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Struktur Organisasi Bamus Nagari

Pasal 44

- (1). Struktur Organisasi Bamus Nagari terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota
 - b. 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap anggota
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan
 - d. anggota
- (2). Personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat Bamus Nagari yang diadakan secara Khusus
- (3). Rapat pemilihan ketua Bamus Nagari untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda
- (4). Pembidangan tugas akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraph 4

Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan larangan

Pasal 45

Bamus Nagari mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan nagari bersama wali nagari
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari
- d. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib Bamus Nagari

Pasal 46

Bamus Nagari mempunyai Hak:

- a. Meminta keterangan kepada pemerintahan nagari, dan
- b. Menyatakan pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 47

Anggota Bamus Nagari mempunyai hak:

- a. Mengajukan pertanyaan peraturan nagari
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan dipilih, dan
- e. Memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

Pasal 48

Anggota Bamus Nagari Mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- b. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari
- d. Memproses pemilihan Wali Nagari
- e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- h. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 49

Pimpinan dan anggota Bamus nagari dilarang

- a. Merangkat jabatan sebagai Wali Nagari, Perangkat nagari, pimpinan lembaga kemasyarakatan
- b. Sebagai pelaksana proyek nagari
- c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan melakukan tindak diskriminasi perlakuan terhadap masyarakat
- d. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dan menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan
- e. Menyalahgunakan wewenang, dan
- f. Melanggar sumpah/janji jabatan

Paragraf 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rapat Bamus Nagari

Pasal 50

Mekanisme rapat Bamus Nagari:

- a. Rapat Bamus Nagari dipimpin oleh Pimpinan Bamus Nagari
- b. Rapat Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak
- c. Rapat khusus Bamus nagari untuk membahas hal tertentu dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Bamus Nagari, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Bamus Nagari yang hadir
- d. Hasil rapat Bamus Nagari ditetapkan dengan keputusan Bamus Nagari dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris Bamus Nagari.

Paragraf 6

Tunjangan Bamus Nagari

Pasal 51

- (1). Pimpinan dan anggota Bamus Nagari menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari
- (2). Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan berupa tunjangan tetap perbulan atau tunjangan kehadiran pada kegiatan Bamus Nagari
- (3). Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBNagari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Bamus Nagari maksimal 25% dari penghasilan tetap wali nagari, dan
 - b. Anggota Bamus Nagari Maksimal 90% dari penghasilan tetap pimpinan Bamus Nagari
- (4). Tunjangan pimpinan dan anggota Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBNagari

Paragraf 7

Persyaratan Anggota Bamus Nagari

Pasal 52

Yang dapat dipilih menjadi anggota Bamus Nagari adalah warga negara Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, pemerintahan dan negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal
- d. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
- e. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- f. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di nagari setempat
- g. Memahami adat istiadat dan syara' dalam nagari yang bersangkutan
- h. Pandai baca tulis huruf Al-Qur'an
- i. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara'
- j. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus

Paragraf 8 Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 53

- (1). Anggota Bamus Nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan Bamus Nagari
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Nagari yang bersangkutan
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota Bamus Nagari
 - e. Dinyatakan melanggar sumpah sebagai anggota Bamus Nagari
 - f. Merangkap jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 49, dan
 - g. Diberhentikan karena melalaikan kewajiban sebagai anggota Bamus Nagari berdasarkan tata tertib Bamus Nagari.
- (2). Anggota Bamus Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diganti oleh calon yang diusulkan oleh jorong darimana anggota Bamus Nagari tersebut berasal yang memperoleh suara urutan berikutnya dalam pemilihan anggota Bamus di jorong yang bersangkutan
- (3). Anggota Bamus Nagari Pengganti Antar Waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.

Bagian Keempat Pemilihan Wali Nagari

Paragraf 1 Umum

Pasal 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan oleh panitia Pemilihan Wali Nagari yang dibentuk oleh Bamus Nagari
- b. Biaya pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBNagari dan APBD Kabupaten

Paragraf 2

Persyaratan dan Mekanisme Pemilihan

Pasal 55

Persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari sebagai berikut:

- a. Beriman, bertaqwa kepada Allah SWT
- b. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, pemerintah dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal
- d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun) pada saat penjangkaran dan penyaringan bakal calon
- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat nagari
- i. Bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari
- j. Memahami adat istiadat dan syara'
- k. Pandai baca dan tulis Al-Qur'an
- l. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara'
- m. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- n. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, diberlakukan bagi penduduk pendatang dan tidak berlaku bagi anak nagari yang bersangkutan
- o. Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari atasan yang berwenang
- p. Bakal calon Wali Nagari yang berkedudukan sebagai pengurus partai peserta pemilu pada semua tingkat kepengurusan harus membuat surat pernyataan akan berhenti menjadi pengurus partai apabila terpilih menjadi Wali Nagari, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- q. Bakal calon wali nagari yang berasal dari dari Ketua atau Anggota Bamus Nagari harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari
- r. Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari aktif, dinonaktifkan oleh Bupati pada saat ditetapkan sebagai calon Wali Nagari, selama Wali Nagari dinonaktifkan pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris Nagari
- s. Apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat ketua KAN harus berhenti sementara dari jabatannya sebagai ketua KAN
- t. Bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan menurut penilaian Bupati tidak dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari berikutnya, dan
- u. Belum pernah menjabat sebagai wali nagari dalam 2 (dua) kali masa jabatan

Pasal 56

Pemilihan Wali Nagari dilakukan melalui tahapan penjaringan dan penyaringan bakal calon, penetapan calon, kampanye, pemungutan suara dan penetapan calon terpilih

Paragraph 3

Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon dan Penetapan Calon Wali Nagari

Pasal 57

- a. Penjaringan bakal calon wali nagari dilakukan dengan pengusulan nama-nama bakal calon wali nagari yang disampaikan kepada panitia Pemilihan Wali Nagari
- b. Bakal Calon wali nagari dapat berasal dari usulan Anggota Bamus Nagari dari masing-masing jorong atau diusulkan oleh unsure-unsur masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kelompok masyarakat di nagari atau atas usul dari bakal calon yang bersangkutan
- c. Yang dapat diusulkan atau mengusulkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Beriman, bertaqwa kepada Allah SWT
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, pemerintah dan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat pertama (SLTP) dan atau sederajat yang bisa dibuktikan dengan ijazah formal
 - d. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun (dua puluh lima tahun) pada saat penjaringan dan penyaringan bakal calon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sehat jasmani dan rohani
- f. Berkelakuan baik, jujur dan adil
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- i. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat nagari
- j. Bersedia dicalonkan sebagai Wali Nagari
- k. Memahami adat istiadat dan syara' dalam nagari yang bersangkutan
- l. Pandai baca dan tulias Al-Qur'an
- m. Tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat dan syara'
- n. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus diberlakukan bagi anak nagari yang lahir dan atau besar di nagari yang bersangkutan
- o. Bakal calon wali nagari yang berasal dari pegawai negeri, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari atasan yang berwenang
- p. Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari angora bamus nagari harus mengundurkan diri dari keanggotaan Bamus Nagari
- q. Bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Wali Nagari Aktif, dinonaktifkan oleh bupati pada saat ditetapkan sebagai calon Wali Nagari, selama Wali Nagari dinonaktifkan pelaksanaan tugas dijabat oleh Sekretaris nagari
- r. Apabila Sekretaris Nagari diusulkan atau mengusulkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari bersama-sama dengan Wali Nagari, maka Camat atas nama bupati menunjuk Pejabat Wali Nagari
- s. Apabila bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat ketua KAN harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua KAN, dan
- t. Bakal calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) yang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatannya tidak memenuhi persyaratan menurut penilaian bupati tidak dapat dicalonkan sebagai Wali Nagari berikutnya

Pasal 58

1. Pengusulan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana pasal 57 disampaikan kepada panitia pemilihan Wali Nagari dengan surat pengusulan yang ditandatangani oleh pihak pengusul
2. Surat pengusulan Bakal Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan dengan melampirkan syarat-syarat administrative sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku
- b. Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang
- c. Surat keterangan kesehatan dan bebas narkoba atau penggunaan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah
- d. Surat keterangan Catatan Kepolisian dari kapolsek setempat
- e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi wali nagari dari bakal calon yang bersangkutan
- f. Surat pernyataan bersedia menetap di Nagari dan atau kecamatan apabila terpilih menjadi Wali Nagarii
- g. Izin tertulis dari atasan yang berwenang bagi bakal calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri
- h. Surat keterangan non aktif dari pimpinan Partai Politik, bagi bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat sebagai pengurus partai politik
- i. Surat pengunduran diri dari keanggotaan sebagai pimpinan atau anggota bamus, dan
- j. Surat pengunduran diri dari kepengurusan KAN bagi bakal calon Wali Nagari yang sedang menjabat Pengurus KAN

Pasal 59

- (1). Nama-nama bakal calon Wali Nagari yang telah masuk kepada panitia pemilihan melalui penjangkaran bakal calon Wali nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 57 diumumkan kepada masyarakat
- (2). Pengusulan bakal calon wali nagari yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrative maka kepada pihak pengusul diberikan kesempatan untuk melengkapi paling lambat 7 hari sejak tanggal pengumuman bakal calon oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari
- (3). Nama-nama bakal calon wali nagari hasil penjangkaran dengan persyaratan administrasi yang lengkap ditetapkan sebagai bakal calon Wali Nagari yang berhak mengikuti proses penyaringan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari dan diumumkan kepada masyarakat

Pasal 60

- (1). Penyaringan bakal calon Wali Nagari dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2)
- (2). Penyaringan bakal calon wali Nagari merupakan kewenangan penuh panitia pemilihan dan keputusan panitia pemilihan Wali Nagari dalam menentukan calon yang lolos dan tidak lolos penyaringan yang ditetapkan melalui rapat Paripurna Panitia Pemilihan tidak dapat diganggu gugat
- (3). Calon Wali Nagari yang lolos penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan sebagai calon Wali Nagari dengan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4). Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang
- (5). Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (4) diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari melalui pengumuman lisan dengan maksud diketahui oleh masyarakat banyak
- (6). Apabila calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan Wali Nagari harus melakukan penjaringan ulang

Pasal 61

- (1). Calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri
- (2). Apabila calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pemilihan ternyata memperoleh suara terbanyak, maka perolehan suaranya dibatalkan
- (3). Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka calon Wali Nagari yang mendapatkan dukungan suara terbanyak berikutnya ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih

Paragraf 4

Kampanye Calon Wali Nagari

Pasal 62

- (1). Kampanye calon Wali Nagari dilaksanakan dalam bentuk penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Wali Nagari dalam Rapat Paripurna Bamus Nagari yang terbuka untuk umum
- (2). Waktu dan tempat kampanye ditetapkan oleh panitia Pemilihan Wali Nagari setelah mendapatkan persetujuan Bamus Nagari

Paragraf 5

Pemungutan Suara

Pasal 63

- (1). Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari
- (2). Penetapan waktu dan tempat pemungutan suara disampaikan kepada masyarakat yang berhak memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara
- (3). Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis dan dalam bentuk lain dengan syarat bahwa masyarakat yang berhak memilih dapat mengetahuinya

Pasal 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat atau berhak memberikan suara dalam pemilihan wali nagari adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk nagari yang bersangkutan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai penduduk nagari yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah pada saat pendaftaran dilaksanakan, dan
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 65

Panitia Pemilihan Wali Nagari dan Calon Wali Nagari tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Calon Wali Nagari

Pasal 66

Ketentuan teknis dan tata cara pengumutan suara akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Paragraf 6 Perhitungan Suara

Pasal 67

- (1). Penghitungan suara dilakukan KPPS sesuai dengan waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan Wali Nagari di masing-masing TPS yang dapat disaksikan oleh masyarakat, pemilih, saksi-saksi para calon wali nagari dan pihak lain yang berwenang
- (2). Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam berita Acara Penghitungan suara oleh KPPS
- (3). Laporan hasil pemungutan suarat berikut berita acara penghitungan suara harus disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan hari pemungutan Suara

Pasal 68

- (1). Berdasarkan laporan dan berita acara penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (3), Panitia Pemilihan Wali Nagari melakukan rekapitulasi hasil pengumuman suara yang dituangkan dalam berita acara
- (2). Pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihadiri oleh para saksi dari masing-masing calon atau pihak lain berdasarkan undangan Panitia Pemilihan Wali Nagari

Pasal 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan teknis dan tata cara penghitungan suara akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Paragraph 7 **Penetapan Calon Terpilih** **Pasal 70**

- Calon wali Nagari yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak
- Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Wali Nagari kepada Bamus
- Calon Wali nagari terpilih ditetapkan dengan keputusan Bamus berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan
- Calon Wali Nagari terpilih disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati guna dikukuhkan menjadi Wali Nagari
- Camat meneliti usulan pengukuhan wali Nagari yang disampaikan Bamus Nagari dan Menyampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima
- Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan Pengangkatan Wali Nagari paling lama 15 hari terhitung tanggal penyampaian hasil pemilihan dari Camat

Paragraph 8 **Pelantikan Wali Nagari** **Pasal 71**

- Wali Nagari terpilih dilantik oleh bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati
- Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan di nagari bersangkutan dihadapan masyarakat
- Wali Nagari sebelum memangku sumpah menurut Agama Islam yang dipandu oleh pajabat yang melantik
- Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3), berbunyi sebagai berikut:

“demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; bahwa saya akan menegakkan dan mengamalkan ajaran Agama Islam dan Adat Minangkabau sebagai perwujudan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Pasal 72

Biaya kegiatan Pemilihan Wali Nagari dibebankan kepada APBD Kabupaten dan APBNagari yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 73

Masa jabatan Wali Nagari adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 74

Wali Nagari harus bertempat tinggal di nagari dan atau kecamatan yang bersangkutan sebagai bukti pernyataan kesediaan bertempat tinggal di Nagari sebagai salah satu syarat menjadi Wali nagari

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemilihan, penetapan, pengukuhan dan pelantikan Wali Nagari dengan Peraturan Bupati

Bagian Kelima

Atribut, Pakaian Dinas dan penghargaan

Pasal 76

Wali Nagari dan Perangkat nagari dalam melaksanakan tugasnya menggunakan atribut dan pakaian dinas.

Pasal 77

Wali Nagari dan perangkat Nagari yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 83

Pasal 84

Pasal 85

Pasal 86

Pasal 87

Pasal 88

Pasal 89

Pasal 90

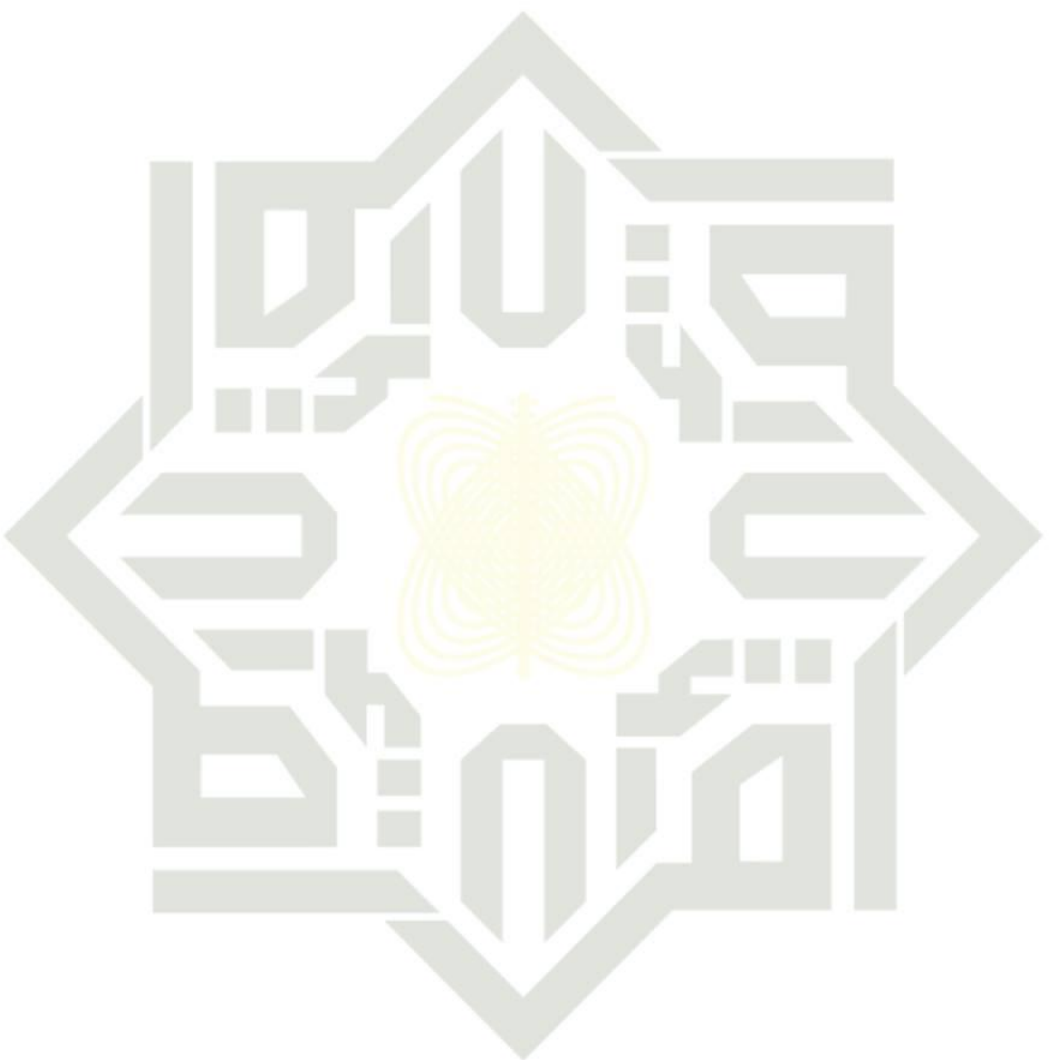
Pasal 91

Pasal 92

Pasal 93

Pasal 94

Pasal 95



UIN SUSKA RIAU

Pasal 96

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

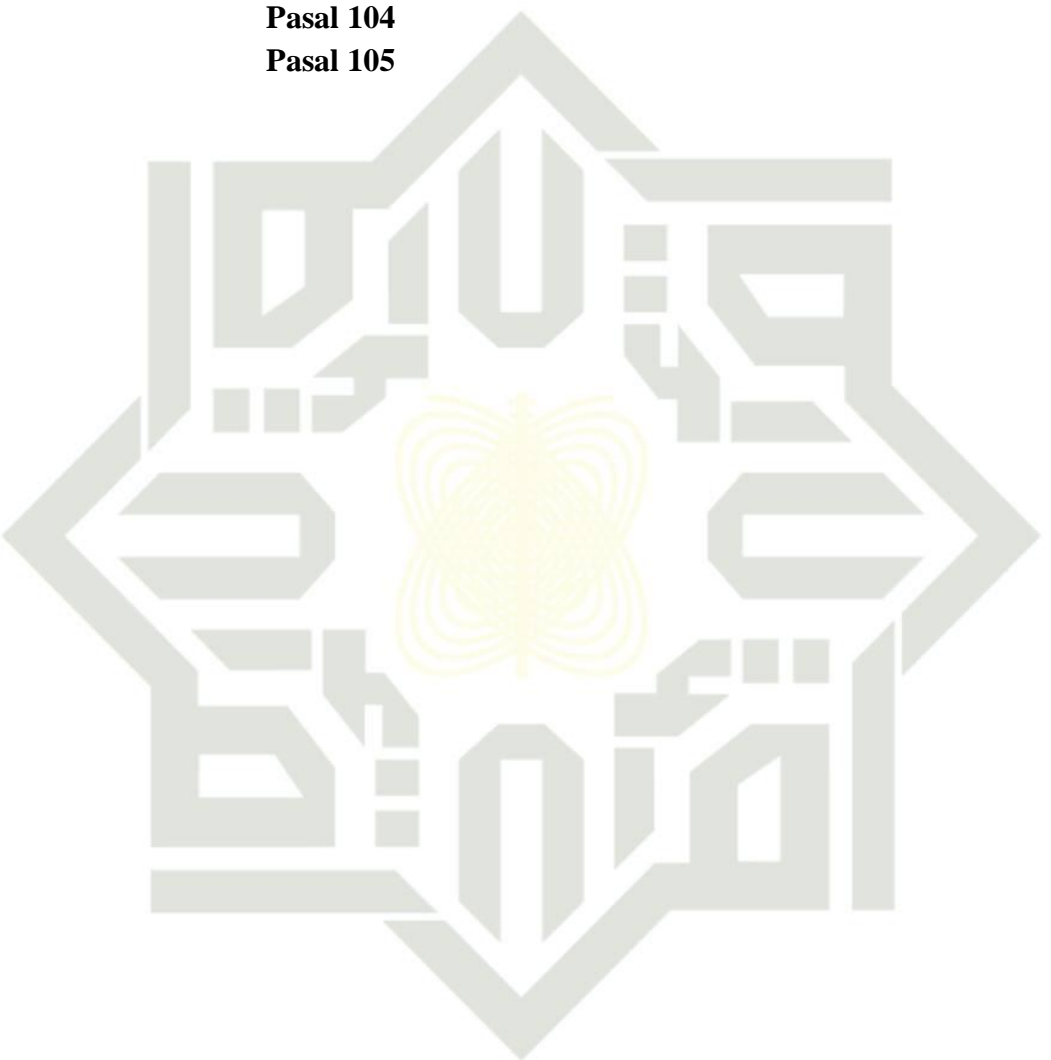
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100
Pasal 101
Pasal 102
Pasal 103
Pasal 104
Pasal 105



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Daftar Kecamatan dan Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota

	Nama Kecamatan	Jumlah Nagari	Daftar Nama Nagari
1.	Akabiluru	7	1. Koto Tangan 2. Batu Hampar 3. Sariak Laweh 4. Sungai Balantiak 5. Suayan 6. Pauah Sangik 7. Durian Gadang
	Bukik Barisan	5	1. Banja Loweh 2. Baruah Gunuang 3. Koto tengah 4. Maek 5. Sungai Naniang
	Guguak	5	1. Sungai Talang 2. Guguak VIII Koto 3. Kubang 4. Simpang Sugiran 5. VII Koto Talago
	Gunuang Omeh	3	1. Koto Tinggi 2. Talang Anau 3. Pandam Gadang
	Harau	11	1. Tarantang 2. Sarilamak 3. Solok Bio Bio 4. Harau 5. Gurun 6. Lubuak Batingkok 7. Koto Tuo 8. Batu Balang 9. Bukik Limbuku 10. Taram 11. Pilubang
6.	Kapur IX	7	1. Koto Lamo 2. Lubuak alai 3. Muari Paiti 4. Koto bangun 5. Durian Tinggi 6. Sialang 7. Galugua
7.	Mareh Sago Halaban	8	1. Ampalu 2. Halaban 3. Sitanang 4. Tanjuang Gadang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			5. Labuah Gunuang 6. Balai Panjang 7. Bukik Sikumpa 8. Batu Payuang
	Luak	4	1. Mungo 2. Andaleh 3. Sungai Kamuyang 4. Tj. Aro Sikabu-kabu
	Mungka	4	1. Mungka 2. Jopang Manganti 3. Talang Maua 4. Simpang Kapuak
	Pangkalan Koto Baru	6	1. Koto Alam 2. Manggilang 3. Pangkalan 4. Gunuang Malintang 5. Tanjuang balik 6. Tanjuang pauah
	Payakumbuh	7	1. Taeh Bukik 2. Taeh Baruah 3. Koto Tengah Simalanggang 4. Koto Baru Simalanggang 5. Simalanggang 6. Piobang 7. Sungai Beringin
	Situjuah Limo Nagari	5	1. Situjuah Gadang 2. Situjuah Banda Dalam 3. Situjuah Ladang Laweh 4. Situjuah batua 5. Tungka
	Suliki	5	1. Suliki 2. Kurai 3. Sungai Rimbang 4. Limbanang 5. Tanjuang Bungo

Sumber: data Base Nagari VII Koto Talago

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-7046522
Fax. 0761-211 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru.inco.net.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/1190/2019 Pekanbaru, 04 Februari 2019 M
: Biasa 28 Jumadil Awwal 1440 H
: -
: Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. **Dr. Mahmuzar, M.Hum**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Ratna Sari Wulan
NIM : 11575201022
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta UIN Suska Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penjiwaan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan untuk tujuan mengiklankan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-7046522
Fax. 0761-211 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru.inco.net.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/1191/2019

Pekanbaru, 04 Februari 2019 M

Biasa

28 Jumadil Awwal 1440 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ratna Sari Wulan
NIM. : 11575201022
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten
50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian
VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota" Untuk itu kami
mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta: Undang-Undang RI No. 19/2002

1. Dilindungi undang-undang, dan setiap orang dilarang menyalin, mengutip, atau melakukan tindakan lain yang merugikan hak cipta tanpa izin dari UIN Suska Riau.

a. Penyalinan, pengutipan, atau tindakan lain yang merugikan hak cipta untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmpstsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B.070 / 245 - PERIZ/DPM&PTSP/III/2019

Rekomendasi Penelitian

- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/19614 tanggal 6 Maret 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : RATNA SARI WULAN
 Tempat/Tanggal lahir : Padang Jopang/19 Mei 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jorong Padang Jopang Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota
 Nomor Kartu Identitas : 1307025905960002
 Tujuan : Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari
 Lokasi Penelitian : Kenagarian VII Kota Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota
 Jadwal penelitian : Maret-April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Maret 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

MASWAR DEDI, AP, Msi
 NIP. 19740618-199311-14001



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/19614
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : VII/PP.00-9/1191/2019 Tanggal 4 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RATNA SARI WULAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11575201022 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN 50 KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KENAGARIAN VII KOTO TALAGO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN 50 KOTA |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Maret 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyampaian :

Penyampaian Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Hak Cipta D
Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi naskah ini tanpa mengonfirmasi dan menandatangani sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jalan Pahlawan No. 5 Payakumbuh – 26211 Telp.Fax (0752)94155 /94097

REKOMENDASI

Nomor : 300/79/BKBP-LK/III/2019

Tentang

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota, setelah mempelajari surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor: B.070/245-PTSP/III/2019, tanggal 12 Maret 2019, Perihal : Izin Penelitian, dengan ini kami menyatakan **tidak keberatan** atas maksud melakukan Penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan oleh :

Nama	: RATNA SARI WULAN
Lempat/Tanggal Lahir	: Padang Jopang, 19 Mei 1996
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Jorong Padang Jopang Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
NK / NIM	: 1307025905960002
Judul Penelitian	: ANALISIS SISTEM PEMERINTAHAN NAGARI MELALUI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI
Lokasi Penelitian	: Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu Penelitian	: 18 Maret s/d 18 April 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian
2. Memberitahukan/melaporkan diri kepada instansi terkait dan menjelaskan kedatangan serta menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan penelitian, serta melaporkan diri sebelum meninggalkan lokasi penelitian
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat dan tatanan yang ada
4. Mengirimkan laporan hasil penelitian (Skripsi) sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Bupati Lima Puluh Kota cq Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Apabila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Rekomendasi ini dicabut kembali.

Demikian Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, 18 Maret 2019

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kabid KPM

Drs. RASDISON. M.Si

NIP. 19640908 199103 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Lima Puluh Kota sebagai (laporan).
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Padang
3. Camat Guguak di Guguak
4. Wali Nagari VII Koto Talago di VII Koto Talago

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ratna Sari Wulan
 NIM/SMT : 11525201022 / 8 (Delapan)
 JUDUL SKRIPSI : Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten SO Kota Nomor 2 tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Kecamatan VII Koto Talang Kecamatan Guguk Kabupaten SO Kota

No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Faraf Pembimbing
1	22/2/2018.	- Penelitian terdahulu buat tabel. - Buat populasi dan sampel penelitian. - Teknik pengumpulan data + kuisioner	3p
	1/3/19	Teknik penarikan sampel. - Buat kuisioner dan Daftar wawancara.	3p
	4/3/19.	- Sub indikator penelitian. pahami - dgn baik.	3p
	16/7/19.	- Wawancara / wawancara. - Tugas, fungsi, hak dan kewajiban. Pembahasan penelitian harus fokus dan detail sesuai permasalahan.	3p
	5/8/2019.	- Kesimpulan atau jawaban terhadap Rumusan Masalah dan tujuan penelitian. - Jurnal sub bab lain lain. - Daftar isi EYD.	3p
	6/8/2019.	- Putusan Abstrak dan kesimpulan. Daftar pustaka	3p

NB : Kartu ini dilampirkan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan KAJUR untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru,

20

Pembimbing I



BIMBINGAN SKRIPSI



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN GUGUAK
NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO

Alamat : Jalan Tan Malaka KM 17 Payakumbuh Telp (0752) 748458

Website : <http://www.7kototalago.net> Email : kim7koto@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 423/ 1016 /Pem /2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Tujuh Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota :

NIK : 1307025905960002
Nama : RATNA SARI WULAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang Jopang / 19 Mwei 1996
Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Islam Sultan Syarif Qasim Riau.
NIM : 11575201022
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Alamat KTP : Jorong Padang Japang Nagari Tujuh Koto Talago

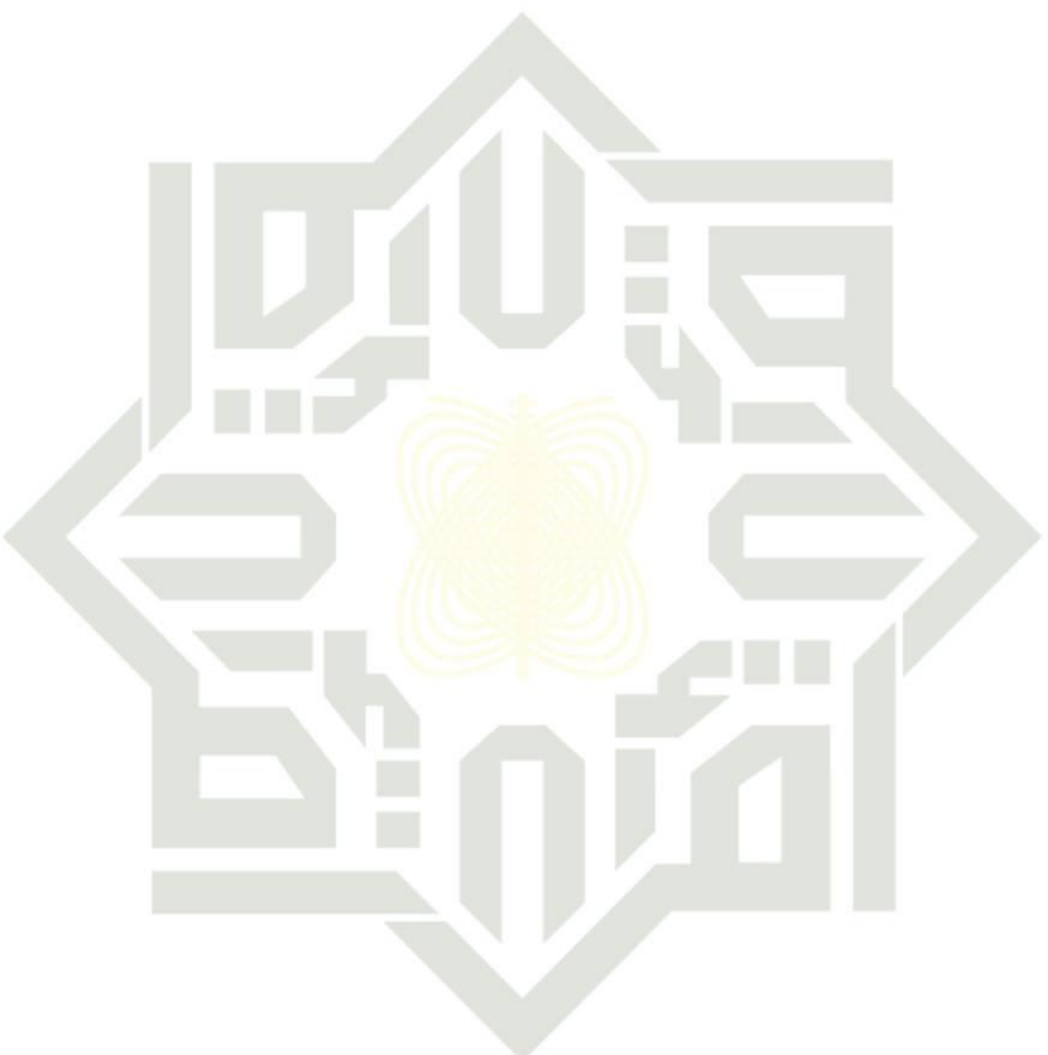
Bahwa yang bersangkutan memang benar telah selesai melaksanakan Tugas Penelitian dengan Judul : **Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari di Wilayah Nagari Tujuh Koto Talago**, dengan lama Penelitian dari tanggal 18 Maret s/d 18 April 2019, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 300/79/BKPB-LK/III/2019.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
keperluannya

Talago, 04 April 2019
NAGARI TUJUAH KOTO TALAGO
NIZWAR, ZA

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Ratna Sari Wulan, Lahir di Padang Japang pada tanggal 19 Mei 1996. Merupakan anak Ketiga dari tiga (3) bersaudara. Ayah bernama Refrizal dan ibu bernama Erlinda Yarni. Pada tahun 2009 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 02 Padang Japang. Pada tahun 2012 Penulis menyelesaikan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Padang Japang dan pada tahun 2015 Penulis menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Padang Japang. Dan pada tahun yang sama Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur SNMPTN, dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2018 di KASUBBAG Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan di tahun yang sama Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Batang Kulim Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau.

Berkat rahmat Allah SWT pada tanggal 27 September 2019 penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“Analisis Sistem Pemerintahan Nagari Melalui Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Nagari di Kenagarian VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota”**